



expert

EKONOMI PASCA PERANG

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.

PROF. DR. H. APRIDAR, M.SI

EKONOMI PERADABAN

EKONOMI, POLITIK, PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

2015

@Apridar2015

Ekonomi Peradaban: Ekonomi, Politik, Pendidikan Dan Keagamaan

Diterbitkan pertama kali, Maret 2015

xxiv + 0000 hlm.

12 cm x 17 cm

ISBN :

hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk dan tujuan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

dilarang memperjualbelikan buku ini dalam keadaan rusak
dan mengedarkannya dalam bentuk jilid atau sampul lain

Editor :

Proofreader :

Desain sampul :

Tata letak :

Sambutan Gubernur Aceh

MEMBANGUN ACEH SECARA HOLISTIK

Saya menyambut baik setiap kontribusi positif dalam mengisi pembangunan Aceh. Kehadiran buah pikir Profesor Apridar (Rektor Unimal Lhokseumawe, *ed*) menjadi sebuah catatan dan pemikiran menarik, sebagai masukan bagi pemerintah dan elemen lainnya dalam mengisi setiap ruang pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Melalui bunga rampai ini, Profesor Apridar mengingatkan kita bahwa Aceh ini harus dibangun dengan basis ilmu pengetahuan. Karena hanya basis itulah yang akan memperkuat basis-basis lainnya. Konflik dan tsunami harus menjadi pembelajaran bagi Aceh dalam mengisi pembangunan secara holistik.

Kehadiran elemen kampus dalam pemberdayaan masyarakat dan penelitian harus lebih "mengigit". Sudah saatnya kampus keluar dari paradigma simbolistik. Elemen kampus harus "lihai" bermain dalam kondisi apapun lebih substantif.

Pembangunan Aceh secara substantif, menjadi bagian dari cita-cita kita bersama, untuk membawa masyarakat Aceh yang mandiri dan merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Itulah kemerdekaan pembangunan substansial yang ingin kita raih. Dalam mempersiapkan pembangunan di Aceh tiga tahun ke depan, kami juga sudah menyiapkan rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau RPJMA 2012-2017, di mana ada 10 program pembangunan yang kita prioritaskan, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
2. Keberlanjutan perdamaian;
3. Dinul Islam, sosial, adat dan budaya;
4. Ketahanan pangan dan nilai tambah pertanian;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Pendidikan;
7. Kesehatan;
8. Infrastruktur yang terintegrasi;
9. Sumber daya alam berkelanjutan dan;
10. Masalah lingkungan hidup dan kebencanaan.

Di samping program yang disiapkan Pemerintah Aceh, dalam agenda pembangunan Indonesia, Aceh juga sudah dimasukkan dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, di mana Aceh diharapkan menjadi koridor pengembangan ekonomi di wilayah Sumatera.

Dengan menjadi koridor pembangunan di wilayah Sumatera, maka jaringan ekonomi di Aceh lebih terbuka, termasuk akses langsung Aceh ke dunia internasional. Sebagai konsekuensi dari program tersebut, Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp1,25 triliun untuk perluasan dan pengembangan pelabuhan Krueng Geukueh di Aceh Utara. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi salah satu gerbang ekspor produk Aceh ke dunia internasional.

Selain pelabuhan Krueng Geukueh, fungsi tiga pelabuhan laut lainnya

juga diperluas, yaitu Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar, Pelabuhan Kuala Langsa, dan tentu saja Pelabuhan Bebas Sabang yang sampai sekarang pembangunannya masih terus berlangsung. Untuk mendukung semua itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran pembangunan pada tahun 2013 sebesar Rp11,7 triliun.

Sejalan dengan kehadiran program ini, perhatian terhadap sektor pertanian dan perdagangan akan kita tingkatkan. Pembangunan infrastruktur di lintas tengah dan barat akan diperbanyak untuk keadilan.

Perlu kami sampaikan pula, situasi keamanan di Aceh belakangan ini sangat menggembirakan. Bagi para insan kampus, ini harus dimanfaatkan untuk penelitian dan dapat menyampaikan kepada dunia, bahwa Aceh sudah kondusif bagi semua investasi.

Saya berharap, para akademisi di Aceh harus lebih banyak lagi melakukan produksi keilmuan. Salah satunya melalui penulisan buku, baik berbasis buku populer maupun buku-buku ilmiah berbasis penelitian.

Demikian harapan kami. Semoga setiap gagasan baik, selalu menjadi inspirasi bagi semua unsur masyarakat Aceh. Akhirnya, dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" semoga buku ini bermanfaat bagi semua rakyat Aceh.

Banda Aceh, 15 Agustus 2014



dr.H. Zaini Abdullah

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR ACEH

DAFTAR ISI

BAB I : EKONOMI

1. Ekonomi Islam
2. Pengaruh Keynesian dalam Rekonstruksi Ekonomi Aceh
3. Gerakan Wakaf Untuk Aceh
4. Fungsi Parpol Menyiapkan Kader Perencanaan dan Penganggaran
5. Bahas Krisis Pangan di Kochi University
6. Desain Ekonomi Aceh
7. Mendorong Pengembangan Bank Syariah

BAB II : POLITIK

1. Runtuhnya Modal Sosial di Aceh
2. Mengisi Wali Nanggroe
3. Belajar Dari Hiroshima
4. Aceh Dalam Wacana Disintegrasi
5. Pembangunan Berbasis 4 Pilar Kebangsaan
6. Ihwal Nilai Kebangsaan

BAB III : PENDIDIKAN

1. UNIMAL Menuju Good University Governance
2. UNIMAL Menuju Pendidikan Berbasis Karakter
3. Desain Pembangunan Pendidikan Aceh
4. UTU dan Pembangunan Barat Selatan
5. Universitas Jabal Ghafur Lokomotif Pembangunan
6. Pembangunan Berbasis Keilmuan
7. Memperbaiki Tunamoral

BAB IV : Keagamaan

1. Mazhab Bohong dalam Masyarakat
2. Puasa dan Etos Kerja
3. Puasa Sebagai Pendidikan Karakter
4. Puasa, Produktivitas dan Etos Kerja
5. Keadilan Dalam Islam
6. Islam Rahmatan Lil'alamin

DAFTAR PUSTAKA

Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh

Harian Rakyat Aceh, Banda Aceh

Harian Kompas, Jakarta

BAB I

EKONOMI PERADABAN DALAM EKONOMI

EKONOMI ISLAM

EKONOMI berbasis Islam, atau lebih dikenal dengan sebutan Ekonomi Islam belakangan menjadi *rule models*, bagi sistem ekonomi di belahan dunia. Pelaku sistem ekonomi konvensional secara massif mulai beralih kepada sistem ekonomi Islam (syariah). Hal ini menjadi titik tolak bagi Negara Indonesia sebagai penganut Islam mayoritas untuk memberi contoh yang lebih "radikal" bagi Negara-negara lain.

Di saat sistem ekonomi non Islam mengalami krisis di belahan dunia saat ini. Ekonomi Islam pelan-pelan menjadi solusif bagi masyarakat dunia. Ekonomi Islam hari ini benar-benar menjadi solusi dari krisis global.

Ada unsur penting dalam ekonomi Islam yang menjadi inspirasi bagi non muslim adalah sistem ekonomi Islam berlandaskan kejujuran, produktivitas dan berdaya guna. Akhir dari proses dalam ekonomi Islam adalah untuk mendapat barakah dari Allah sebagai pencipta manusia.

Ekonomi Islam menjadi unsur sakral dalam memarginalkan kemiskinan, bergandeng tangan untuk membawa kemaslahatan bagi semua elemen warga. Lebih tajam kemudian terdapat unsur pemberdayaan yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur tersebut menjadi pemicu inspirasi bagi semua orang untuk menerapkan sistem ekonomi Islam.

Dari semua itu, tak lepas dan "kegagalan" sistem ekonomi yang selama ini diterapkan menjadi sumbu bagi krisis global dalam sistem ekonomi konvensional. Perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah pertama secara epistemologis ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian ajaran Islam. Karena ia sebagai ajaran maka ekonomi Islam bersumber secara langsung dari Allah.

Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan

nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam. Seperti bunga dan jenis lain yang serupa dengannya.

Itulah unsur "krisis" dari perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Namun begitu, bukan tidak ada halangan bagi ekonomi Islam. Kendalanya adalah pada tataran implementatif masih belum "mampu" menyelesaikan kemelut ekonomi masyarakat. Namun ini masih proses, sebagai sebuah rotasi dari perjalanan sejarah dalam sistem ekonomi. Proses ini harus direspon untuk kejayaan umat Islam dan ekonomi Islam.

Karenanya, bicara ekonomi Islam, mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan dua pemikiran besar sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme (marxisme). Ekonomi Islam hadir tak semata-mata mengoreksi kedua sistem ekonomi tersebut melainkan menawarkan pemikiran yang jauh lebih baru serta dengan sistem yang lebih memanusiakan manusia. Di tubuh rezim-rezim sosialis-komunis, seperti dipahami, cenderung otoriter di bidang politik, sementara di bidang ekonomi, rakyat mengalami penderitaan yang menggenaskan.

Garet Garret, seperti dikutip Bernard Murchland dalam *Humanisme dan Kapitalisme* (1992) membuat sebuah kesimpulan bahwa bisnis modern terutama kapitalisme berangkat dari tiga nafsu: nafsu kebendaan, nafsu kemegahan pribadi, dan nafsu kekuasaan. Ketiga hal inilah yang membedakan Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Diakui atau tidak, Islam ternyata berbeda dengan agama-agama besar lainnya. John Thomas Cummings dkk dalam *Islam dan Perubahan Ekonomi Modern* (John L. Esposito; 1986) menyebutkan bahwa Islam memberikan penganutnya suatu ajaran terperinci tentang sistem ekonomi, terutama berkaitan dengan masalah-masalah perpajakan (zakat), pengeluaran pemerintah, warisan, hak-hak pribadi, kesejahteraan sosial dan ekonomi (pembagian pendapatan, kemiskinan, dan hal-hal lain), bunga uang, pemilikan tanah, sumber alami, tingkat gaji dan lain sebagainya.

Dalam hal perpajakan, misalnya, dalam Islam terdapat dua struktur pajak. Pertama, satu untuk orang Islam yang langsung terambil dari sumber-sumber tersebut di atas, dan Kedua, untuk orang yang tidak beragama Islam. Pajak utama dalam Islam itulah yang disebut zakat, di mana istilah ini digunakan berkenaan dengan hak milik binatang ternak; emas, perak dan barang-barang perdagangan; dan hasil bumi.

Sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam, Aceh seharusnya menjadi pelopor dalam penerapan sistem ekonomi Islam, terutama bagaimana mengembangkan sistem zakat sebagai kekuatan ekonomi. Pengelolaan zakat selama ini di Aceh memang sudah jauh lebih maju dan sudah menjadi salah praktek yang mendongkrak perekonomian masyarakat. Sistem distribusi zakat, untuk pendidikan dan pembangunan, sudah menunjukkan hasil nyata. Namun, ke depan hal ini perlu lebih ditingkatkan dengan menyasar kelompok-kelompok rentan dalam bentuk pemberian modal usaha.

Selama ini, distribusi zakat belum menyentuh hal-hal tersebut. Padahal, dana zakat yang terkumpul, baik di baitul mal atau lembaga lain, jika dikelola secara profesional mampu dimanfaatkan sebagai modal usaha. Kita mampu membantu banyak usaha kecil menengah, bahkan kelompok yang baru merintis usaha. Dengan demikian, esensi sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai salah satu medium mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkecil jurang antara si miskin dan si kaya dapat diminimalisir. Sehingga dengan penerapan sistem ekonomi Islam secara benar-benar di Aceh, kita sangat yakin akan mengantarkan Aceh menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur! []

PENGARUH KEYNESIAN DALAM REKONSTRUKSI EKONOMI ACEH

PEMIKIRAN Keynesian pernah diterapkan meluas ketika terjadi depresi besar melanda dunia (tahun 1930-an), sampai pada aneka krisis era 1970an, serta kembalinya penerapan kebijakan ini oleh kaum pakar prominen ekonomi beserta pembuat kebijakan ekonomi politik, ketika krisis 2008/2009 dimulai. Pada 2013 ini, seiring dengan kebangkitan baru spirit Keynesianisme, juga telah diterbitkan kembali edisi khusus kumpulan karya lengkapnya dalam XXX jilid oleh The Royal Economic Society. Yaitu, *The Collected Writings of John Maynard Keynes* (ed. by Robinson & Moggridge), Cambridge/New York, 2013.

Seolah, pro dan kontra terhadap implementasi pemikiran ini berlangsung tanpa henti, bahkan penerapannya pun terlihat makin multidimensi, sementara perkembangan visi akhirnya bersintesa aneka influensi. Kaum politisi menggandrunginya, karena intervensi politik yang sentral di dalamnya, di mana dengan paket konjunktur yang dipromosinya, terkadang kerap membawa negara dalam lilitan utang. Koran ekonomi terbesar Jerman, *Handelsblatt* (edisi 15, 16, 17 Februari 2013), bahkan memuat laporan utama visi Keynesian, pakar ekonomi yang menjelang kematiannya bergumam: *I am not a Keynesian!*

Mungkinkah batas-batas tertentu dari pemikiran Keynesian bisa teraplikasikan atau dikontekstualkan dalam strategi pembangunan politik ekonomi di Aceh? Jika mungkin, baik total maupun parsial, dengan kondisi dan situasi Aceh kini relevan berorientasi dalam perspektif teoretis ini? Bagaimana dengan relasi unik hubungan hukum tatanegara antara pemerintahan sentral (Indonesia) dengan pemerintahan provinsi (Aceh) dalam rekonstruksi ekonomi khusus ini? Apa diferensiasi kebijakan yang boleh dilakukan Aceh dan apa yang hanya menjadi wewenang Pusat (nasional) sudah baku, seperti tertuang dalam aneka kesepakatan pasca reformasi, sejak adanya MoU Helsinki/Perjanjian Damai 15 Agustus 2005 sampai revisi aneka ragan, qanun dan aneka peraturan legalitas lainnya?

Refleksi umum

Tulisan simplifikatif ini mencoba menstimulir beberapa refleksi umum tentang batas-batas pemikiran Keynesian yang relevan. Pandangan ini

sebenarnya bertumpu pada visi tokoh ekonom kawakan, ahli matematika/ekonometri serta politisi ternama John Maynard Keynes (1883-1946), yang dikenal luas melalui visinya tentang teori umum tentang pembangunan ekonomi, seperti tertuang dalam buku monumentalnya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Dengan karya inilah, JM Keynes mulai digolongkan sebagai pemikir paling berpengaruh di abad ke-20.

Karya-karyanya telah ikut merevolusikan teori baru dan praktik ekonomi modern. Dampak pemikirannya sangat jelas terlihat umumnya pada bagaimana cara kebijakan ekonomi secara efektif bisa diterapkan. Karyanya telah menjadi sumber inspirasi buat semua peminat dan para ahli ekonomi/politik, bahkan kerap dipakai juga misalnya buat determinasi level aktivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masalah tenaga kerja, keseimbangan perdagangan, paket konjunktur, problem pengangguran serta sebab-sebab terjadinya inflasi, dll.

Beberapa karya atau kontribusi pemikiran lainnya, termasuk aktivitas intens pribadinya dalam rangka peloporan misi perdamaian dan pembangunan ekonomi dunia pascaperang, mulai dari keterlibatannya dalam perjanjian damai Versailles, revisi dan rekonstruksi ekonomi baru Eropa sampai pada upaya agungnya mendukung pemulihan Pasca-Perang-Dunia via pertemuan global Bretton Woods yang sampai kini masih memberikan dampak kontinuitas atau efek influensinya, seperti via Bank Dunia serta aneka lembaga ekonomi international lainnya.

Dengan latar belakang demikian, jelas terlihat bahwa relevansi Keynesianisme di Aceh, dalam batas-batas tertentu, bisa juga dicoba pahami, mengingat adanya hak istimewa yang dijamin dalam Perjanjian Damai Helsinki (2005), dengan batas otoritas yang pasti. Salah satu fondasinya, dengan jelas termaktub, bahwa Aceh memiliki otoritas 'wilayah kekuasaan istimewa' definitif, yaitu pengakuan batas wilayah hasil keputusan politik tanggal 1 Juli 1956 (MoU butir 1.1.4).

Sementara dimensi vital selanjutnya, juga sesuai Perjanjian Damai Helsinki, khususnya bab 1.3 (tentang Ekonomi) terlihat adanya peran unik Pemerintah Aceh yang terbingkai dalam otoritas sistem Republik Indonesia. Untuk pendekatan kontekstual visi Keynesian ini perlu ditelaah kembali wewenang apa yang tertuang dalam kesepakatan finalnya. Di sini jelas terpapar beberapa hal tertentu, seperti adanya hak istimewa Aceh dalam mencari dana, negosiasi suku bunga dengan Bank Sentral RI, hak

pajak, hak mencari investasi asing langsung, hak mendapatkan 70% hasil alam di wilayahnya, hak administrasi dan mengembangkan pelabuhan laut dan udara, perdagangan bebas, akses hubungan langsung ke luar negeri, dst.

Pandangan Keynesian

Menelaah lebih jauh konsepsi pandangan Keynesian dalam konteks ini, mungkin relevan menilik pada rangkuman brilian visinya seperti yang telah dirumuskan secara filosofis dalam karya monumental utamanya (The General Theory), khususnya dalam Buku VI: Short Notes Suggested by the General Theory, Bab 23 & 24), yang awalnya mengupas influensi pandangan ekonomi merkantilis serta pengaruh sistem proteksionistis, yang kemudian dengan tegas menyimpulkan bahwa keseimbangan perdagangan (*balance of trade*) merupakan target utama dari kebijakan ekonomi di mana pun, yang ikut mengendalikan perkembangan suplai keuangan negara.

Dalam bagian akhir karyanya ini, Keynes menjabarkan juga: adanya akumulasi modal saham yang besar cenderung secara per se mengurangi kesempatan investasi serta terjadinya propensitas (inklinasi) konsumsi yang melemah. Hubungan vital antara akumulasi modal saham dan konsumsi yang mempengaruhi faktor keseimbangan ekonomi adalah salah satu bagian sentral pemikiran Keynesian yang sampai kini tetap relevan dikaji kembali, khususnya tatkala distorsi ekonomi dalam konteks di wilayah tertentu terjadi, termasuk dalam wilayah khusus seperti dalam status otoritas istimewa di wilayah Pemerintahan Aceh kini.

Sementara kontroversi pemikiran Keynesian yang banyak menimbulkan kritik adalah tentang pandangan batas-batas perlunya keterlibatan intervensi pemerintah, politik fiskal, bahaya perdagangan bebas, kebijakan investasi pemerintah, pertumbuhan dengan kontrol antara wewenang Pemerintah Aceh atau Pusat, dll. Dalam ajaran Keynesian, sesuai batasan kerangka teoretis dalam General Theory (hal. 379), inti visinya sebenarnya tertuju pada perlu adanya *an adjustment between the propensity to consume and the inducement to invest* (suatu penyesuaian antara kecenderungan untuk mengonsumsi dan inklinasi untuk berinvestasi). Jika kesesuaian ini tercapai, maka equilibrium (keseimbangan) ekonomi akan terbina.

Namun, langkah kebijakan dan intervensi pemerintah, sesuai teori ini, hanya bisa diterapkan dengan cara tanpa adanya kecendrungan prinsip

otoritarianisme politik; bahkan sebaliknya, diperlukan juga adanya inisiatif dan tanggung jawab individu dalam proses keseimbangan ekonomi, dengan menghindari terjadinya fluktuasi dalam kebijakan investasi misalnya.

Di lain pihak, dalam upaya terbentuknya *full employment economy* yang baik, dimensi pengembangan kebahagiaan individu (setiap pribadi) dalam tatanan sosial yang harmonis harus ikut diperhatikan dengan adanya kebijakan pengembangan sistem kemasyarakatan yang ideal. Ajaran Keynesian juga kurang memahami peran kreatif manusia terhadap pasar dan perkembangan global yang kadang bisa membawa kemakmuran.

Langkah-langkah bijak pemerintah harus mengarah pada jalan praktis menghindari terjadinya destruksi format ekonomi yang sedang berjalan dengan aktif membina terbentuknya *successful functioning of individual initiative*, dalam ajaran Keynesian mungkin harus disinkronkan dengan pandangan, bahwa setiap pribadi dalam wilayah pemerintahan memiliki kemampuan mandiri ala Schumpeterian sebagai target pembangunan ekonomi bersama dalam kerangka yang telah disepakati sesuai dengan harapan sistem kendali demokrasinya.

Peranan pemerintah, dalam batas tertentu, sesuai faktor efisiensi, demi kebebasan pengembangan ekonomi yang mengarah pada harapan egaliter memakmurkan sesama (*udep beusaree*), bukan mengarah pada harapan kelompok tertentu atau sepihak: Kemakmuran bersama adalah berkah kehidupan! []

GERAKAN WAKAF UNTUK ACEH

MENEROPONG dan bermimpi Aceh masa depan yang lebih baik tentu tidak boleh melupakan Aceh masa lampau. Aceh masa lampau harus menjadi inspirasi dalam bertindak dan berkontribusi untuk kemajuan Aceh hari ini. Dalam banyak referensi telah disebutkan bahwa Aceh masa dulu bisa jaya bukan karena semata-mata andil pemimpinnya, melainkan karena ada kontribusi masyarakatnya, yang tidak "rakus" dalam mengelola sumber daya alam. Ditambah memiliki "etika" dagang baik sesama maupun dengan orang tak dikenalnya.

Kisah heroik Aceh masa lampau bisa dipetik dari Habib Bugak yang mewariskan Baitul Asyi di Mekkah. Konon, Habib Bugak membeli tanah di sekitar Mekkah Al-Mukarramah untuk kemudian sebagian dari hartanya diwakafkan untuk masyarakat Aceh di tanah kelahirannya. Sikap serupa juga dilakukan oleh orang tua kita masa lampau di setiap gampong dan dusun. Mereka mewakafkan tanah untuk pendirian dayah dan sekolah-sekolah.

Sebagai bukti, bisa dilacak seantero Aceh, bahwa dasar muasal tanah di mana berdirinya dayah-dayah dan sekolah-sekolah itu berawal dari gerakan wakaf. Gerakan wakaf pada masa lampau di Aceh adalah bagian dari kontribusi, kecintaan dan ketaatan masyarakatnya untuk kemaslahatan masa depan Aceh yang berbasis Islam.

Saat ini, Aceh dalam perspektif keindonesian dalam bidang perwakafan terkesan tidak membawa dampak yang signifikan, walau pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 42 tahun 2006 sebagai turunan pelaksanaan. Banyangkan dengan masa lampau, gerakan wakaf menjadi gaya hidup. Masyarakat berlomba-lomba mewakafkan sebagian hartanya baik untuk tujuan pendidikan maupun lainnya. Sekarang di Aceh malah terjadi sebaliknya, sebagian tanah wakaf yang sudah diniatkan dan dilakukan perwakafan oleh orang tua malah ditarik kembali oleh sanak atau familinya. Ini fenomena empiris dalam pengamatan sosial ekonomi dan keagamaan di Aceh setelah MoU Helsinki.

Beranjak dari fenomena empiris, maka diperlukan gerakan yang holistik untuk mempopulerkan gaya hidup berbasis wakaf. Gerakan ini, akan lebih baik bila Pemerintah Aceh, baik melalui baitul mal untuk ambil peran yang lebih besar dalam kampanye gaya hidup berbasis wakaf.

Wakaf untuk Pendidikan

Hal penting perlunya gerakan wakaf untuk Aceh adalah bagian upaya untuk memajukan Aceh melalui pendidikan. Wakaf untuk pendidikan menjadi penting ketika fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Aceh perlu peningkatan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan harus menjadi *leading sector* dalam memajukan Aceh ke depan.

Alasan lain perlunya gerakan wakaf untuk pendidikan adalah bagian dari mendukung realisasi amanah undang-undang pendidikan untuk alokasi anggaran 20%. Saat ini dana pendidikan 20% yang diamanahkan undang-undang tidak mampu diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh. Makanya gerakan wakaf akan mereduksi ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam realisasi anggaran 20% pada sektor pendidikan dan penelitian.

Belajar dari Jepang, melalui pemerintahnya, baik bersumber dari dana sosial dan "wakaf" telah menempatkan mereka lebih maju dengan Indonesia. Jepang menempatkan dana "wakaf" yang diperoleh dari pihak swasta dan masyarakatnya untuk elemen pendidikan dan penelitian.

Makanya, tak berlebihan bila ke depan membumikan gerakan wakaf di Aceh harus dijalankan secara sistematis dan komprehensif. Pada level kajian dan penelitian sudah seharusnya Perguruan Tinggi Islam berperan aktif dengan cara membuka prodi tentang wakaf secara merata. Pada level pemerintah tentu menjadikan wakaf sebagai salah satu sektor andalan dalam pendapatan daerah yang dapat mengurangi angka kemiskinan.

Gerakan Wakaf untuk Aceh

Setidaknya, ada empat alasan perlu adanya gerakan wakaf untuk Aceh sebagai upaya menjadikan wakaf sebagai gaya hidup dan membumi penerapannya. *Pertama*, angka kemiskinan di Aceh sampai saat ini masih tinggi, maka diperlukan strategi-strategi radikal untuk mengurangi angka kemiskinan melalui wakaf.

Kedua, setelah tsunami dan MoU Helsinki telah terjadi kesenjangan yang kontras antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Dengan adanya gerakan wakaf, diharapkan masyarakat yang kaya akan

peduli terhadap masyarakat yang miskin dengan memberikan wakaf kepada institusi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketiga, masyarakat Aceh mayoritas muslim sehingga memiliki potensi wakaf untuk dikembangkan menjadi pendapatan produktif. Kalau wakaf dikelola menjadi pendapatan produktif, tentu ini menjadi gerakan sosial keagamaan yang besar untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Keempat, Aceh selalu mendapat musibah baik dalam skala kecil maupun besar. Gerakan wakaf menjadi devisa dalam setiap penanganan bencana. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

Dalam perspektif Indonesia, menurut Nur Kholis (2009) dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*), jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Menurut Uswatun Hasanah (2009), di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura, misalnya, aset wakafnya, jika dihitung berjumlah S\$250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES).

Gerakan wakaf kita harapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dalam pembangunan Aceh ke depan. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, maka berbagai upaya dan pengenalan tentang arti penting wakaf harus dilakukan terutama sekali oleh Pemerintah Aceh, Perguruan Tinggi Islam dan stakeholder yang ditunjuk secara terencana dan holistik.

Kita percaya bahwa majunya Aceh tempo dulu karena adanya kerjasama antar pemerintah dengan warganya. Jadi belum terlambat bagi Pemerintah Aceh untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu elemen dalam dalam memajukan Aceh. Kehebatan orang Aceh dulu karena ilmu dan sikap dermawan saling peduli. Hebatnya Malikussaleh dan sultan kerajaan Islam lainnya ketika itu tak terlepas dari peran adanya gerakan wakaf orang Aceh ketika itu.[]

FUNGSI PARNPOL DALAM MENYIAPKAN KADER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PARTAI politik memiliki peran besar dalam membawa perubahan dalam pembangunan bangsa. Kontestasi partai politik menjadi berwibawa bila dikelola dengan benar-benar berdasarkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Adanya kontestasi partai politik tidak terlepas dari perilaku sumber daya manusia di dalamnya dalam mewujudkan kemakmuran bangsa.

Eksistensi sebuah partai politik sangat tergantung pada "kemampuan" para kadernya dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Karena setiap partai dan organisasi pada hakikatnya memiliki tujuan yang mulia untuk kemaslahatan bersama. James I. Gibson (1989:3), menyebutkan dengan perilaku yang terarah pada tujuan (*directed behavior*). Artinya organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama.

Setiap calon legislatif perlu memiliki konsep dasar mengenai perencanaan dan penganggaran. Kemampuan ini mutlak dimiliki dalam mengemban amanah rakyat. Karenanya, seorang calon legislatif sudah harus mampu menganalisis anggaran. Analisa anggaran bisa dalam bentuk penerimaan ABPN dan APBD. Pemahaman-pemahaman umum seperti struktur anggaran, sumber anggaran, alokasi anggaran, belanja publik, belanja pegawai harus betul-betul dikuasai secara matang sebelum terpilih.

Dengan mengetahui pemahaman dasar perencanaan dan penganggaran, maka seorang calon legislatif tentu tidak akan berani berjanji yang "aneh-aneh" untuk meraup suara rakyatnya. Calon legislatif harus menawarkan program yang benar-benar bisa dilakukannya bila terpilih. Tentu salah satunya dengan program-program yang logis sesuai dengan analisa ketersediaan anggaran yang ada pada suatu daerah.

Kemampuan analisa ekonomi mikro bagi seorang calon legislatif harus diasah dengan mengetahui kemampuan anggaran suatu daerah. Kalau tanpa modal pengetahuan analisa anggaran daerah dan modal perencanaan yang kuat, tidak mustahil akan muncul legislator tanpa kontirbutor. Dalam hal ini, masyarakat Aceh juga harus cerdas memilih

wakilnya, supaya dapat membawa manfaat yang berkelanjutan untuk semua warga.

Masyarakat sudah saatnya meninggalkan para calon legislatif yang menawarkan program-program "cet langet" yang mementingkan golongannya daripada kepentingan masyarakat secara umum. Janji-janji politik yang irrasional tidak sehat bagi pengembangan masyarakat Aceh ke depan. Makanya pembangunan Aceh ke depan harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan pada semua sektor.

Fungsi Partai Politik

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan/mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, setidaknya terdapat empat fungsi dari partai politik. *Pertama*, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik artinya proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol di sini berfungsi untuk menyerap, menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik artinya proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau

kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Keempat, partai politik sebagai saran pengatur konflik. Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Basis Perencanaan

Perencanaan dalam politik adalah suatu yang sangat esensial. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Artinya kemampuan politisi dalam bidang perencanaan sangat penting untuk memberi kontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Dalam ilmu perencanaan, sudah menjadi "tradisi" bahwa setidaknya ada empat tahapan dasar dalam sebuah perencanaan. Hal ini juga berlaku dalam bidang politik. *Pertama*, tahapan menetapkan tujuan. Sebuah perencanaan yang baik harus dimulai dengan keputusan-keputusan mengenai keinginan atau kebutuhan organisasi. *Kedua*, tahapan merumuskan keadaan saat ini. Sebuah partai politik harus memahami keadaan rakyat saat ini. *Ketiga*, tahapan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan *Keempat*, tahapan mengembangkan rencana yang berbasih pada kebutuhan rakyat.

Mengemban tugas sebagai penyambung "lidah" rakyat haruslah memiliki strategi dan perencanaan yang matang. Terlibat dalam gerakan partai politik harus benar-benar direncanakan, baik sebelum menjadi anggota dewan, maupun setelah menjadi anggota dewan. Minimal dalam jiwa setiap kader partai politik harus mengetahui makna dari perencanaan itu sendiri.

Perencanaan yang baik tentu akan membantu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan politik yang dinamis. Membantu untuk mengembangkan tanggung jawab lebih baik. Memudahkan koordinasi di antara berbagai

bagian organisasi. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan mudah memahami kebutuhan rakyat. Karena keberadaan seorang politisi harus mampu berdampak sistemik untuk membawa keberkahan kepada semua elemen masyarakat.

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan. *Pertama*, memberikan pengarahannya baik untuk pimpinan pemerintah maupun masyarakat. *Kedua*, untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang pimpinan membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. *Ketiga*, untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, setiap abdi negara dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. *Keempat*, proses pengontrolan dan pengevaluasian dalam setiap program yang dilakukan oleh semua unit pemerintah.

Berbasis Penganggaran

Seorang kader partai politik, sudah seharusnya memiliki nalar analisis terhadap anggaran (*budget*) dalam setiap tahapan politik. Kemampuan ini dibutuhkan karena seorang kader politik memiliki kesempatan untuk menjadi anggota legislatif mewakili aspirasi rakyatnya.

Anggaran (*budget*) dalam artian konsep adalah rencana kuantitatif aktivitas sebuah organisasi (pemasaran, produksi dan keuangan); anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Kalau dalam artian organisasi politik, anggaran berarti dimulai dari anggaran masuk, keluar, tahap realisasi dan pengawasan.

Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Dalam konteks inilah, seorang kader partai politik harus memiliki basis pemahaman yang baik tentang tujuan penganggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator.

Tujuan pokok anggaran adalah untuk memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non finansial di masa yang akan datang. Tujuan lainnya mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima

anggaran. Melalui pemahaman penganggaran yang baik oleh setiap kader partai politik, maka akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun secara khusus, pemahaman yang baik itu, akan membawa kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat aspiratif dan partisipatif. Hal ini akan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik bagi semua elemen rakyat.

Proses penganggaran bukanlah ilmu murni dan pertimbangan yang baik memainkan peran yang esensial. Bila legislator memiliki pemahaman anggaran, maka ia dapat memfilter inisiatif yang tidak berpihak kepada rakyat. Pasalnya, mereka mengetahui setiap perkembangan dan bisa melakukan program-program yang prorakyat dengan analisa anggaran yang tersedia.

Dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta dan situasi nyata di lapangan. Di situlah peran kader partai politik harus partisipatif pada anggaran, menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manajemen organisasi politik secara umum. Bila dilihat dalam bentuk sistem penganggaran, terdapat 4 (empat) rancangan dasar terhadap anggaran; 1) penganggaran incremental, 2) penganggaran basis nol, 3) penganggaran Statik, dan 4) penganggaran fleksibel.

Tapi bila dilihat dari proses penganggaran, maka struktur operasionalnya adalah harus terlebih dahulu mendefinisikan penyusunan anggaran dan mendiskusikan perannya dalam perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya, lalu menguraikan penganggaran dengan sistem penganggaran yang sesuai dengan Undang-Undang untuk mendorong pertumbuhan masyarakat berkelanjutan.

Jadi dengan demikian jelas bahwa kedudukan fungsi partai politik dalam menyiapkan kader ahli perencanaan dan penganggaran sangat vital dalam pembangunan masyarakat Aceh ke depan. Pembangunan masyarakat ke depan harus dibangun dengan basis pengetahuan dalam semua sisi pembangunan. Sudah saatnya, masyarakat Aceh meninggalkan para politisi (legislatif) tanpa bekal pengetahuan, minimal pengetahuan berbasis pada perencanaan dan penganggaran. Semoga!

BAHAS KRISIS PANGAN DI KOCHI UNIVERSITY

SETELAH meninjau lokasi pengeboman, museum dan pertemuan akademis lainnya di Hiroshima, kami yang tergabung dalam delegasi “The 3rd of SUIJI Internasional” menggunakan kereta cepat Shinkansen menuju Kota Kochi yang sejuk dan tenang. Pertemuan puncak akademisi digelar di Southern City Hotel Kochi, 28-30 Agustus 2013. Isu yang akan dibahas dalam pertemuan Internasional ini adalah dampak pemanasan global terhadap krisis pangan dunia, selain berbagai topik menarik lainnya dalam rangka peningkatan pangan dunia.

Delegasi dari Indonesia yang hadir adalah Rektor UNHAS Prof Idrus, Rektor IPB Prof Herry, Rektor USU Prof Syahril, Rektor UNIMAL Dr Apridar dan delegasi UGM yang disambut oleh Rektor Universitas Kochi, Hiroshi Wakiguchi, Ph.D.

Melalui pertemuan tersebut, Universitas yang memiliki Fakultas Pertanian (FP) yang tergabung dalam Six-University Initiative Japan-Indonesia (SUIJI) diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif terhadap persoalan pangan dunia. Konsorsium ini juga salah satu jaringan yang dibangun untuk dapat melakukan penelitian bersama (*joint research*) dalam rangka peningkatan kualitas penelitian sebagaimana yang disarankan oleh Dikti (pendidikan tinggi, *ed*).

Para delegasi Rektor dari Indonesia juga membahas berbagai kegiatan tahunan yang dilakukan di Jepang dan di Indonesia. Penelitian bersama merupakan program prioritas yang akan diusung ke depan. Universitas Hasanuddin dari Indonesia dipercayakan sebagai tuan rumah kegiatan SUIJI yang ke-4 tahun 2014 nanti.

Bagi kita dari Universitas Malikussaleh, ini adalah peluang yang perlu direpson segera. Dengan adanya jaringan yang kita bangun ini diharapkan skema penelitian *Joint research* yang anggarannya setiap tahun disisipkan oleh Dikti dapat dimanfaatkan para peneliti dari Universitas Malikussaleh secara maksimal.

Selain itu, dalam pertemuan Internasional tersebut, juga membahas peranan mahasiswa bagi masyarakat yang dikemas melalui Program KKN (kuliah Kerja Nyata) bersama. Kochi University menawarkan program jasa mahasiswa dan kepedulian sambil belajar.

Program ini tentu akan bermanfaat bagi pengembangan kapasitas mahasiswa ke depan. Ini sekaligus untuk menangkai krisis moral yang terjadi akibat lunturnya nilai empati dari elemen kampus yang kurang dapat mendengar dan merasakan apa yang dikehendaki masyarakat secara umum. Join program yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan nuansa berpikir dan kiprah dari pada insan kampus terhadap masyarakat.

Setelah aktif dalam konferensi, seluruh delegasi juga mengunjungi berbagai sentral perkebunan/laboratorium pertanian Kochi University. Secara umum, Kochi merupakan daerah pertanian yang dipisahkan oleh lautan dan pegunungan. Dengan dibangunnya jalan dan jalur kereta puluhan kilometer di atas laut, membuat daerah penghasil pertanian ini tumbuh pesat, seperti kota-kota lain di Jepang.

Walaupun ada beberapa pabrik yang dibangun dekat pegunungan. Namun, panorama alam Kochi tidak pernah diganggu. Pembangunan rel kereta yang mengharuskan banyak gunung yang mesti ditembusi, namun gunungnya tetap dijaga keasriannya. Hal ini terlihat pada aliran sungai yang airnya cukup jernih dan sering digunakan untuk oleh penikmat arum jeram untuk berpetualang.

Sebahagian besar hasil produk pertanian Kochi, disuplai ke berbagai kota tetangga di Jepang. Pembangunan jalan dan rel kereta yang dibangun dengan anggaran yang cukup besar, cukup berdampak terhadap pembangunan pertanian di Kochi. Produk pertanian Kochi, kualitasnya mampu bersaing dengan produk impor lainnya.

Sikap masyarakatnya yang selalu bekerja keras dengan hasil yang terbaik telah tertanam dalam benak masyarakat Jepang. Kualitas hasil produksi selalu dijaga. Hasil pertanian yang cacat atau sering orang sering menyebutnya sebagai kualitas kedua di Jepang tidak pernah dipakai atau dijual. Barang *reject* tersebut selalu dibuang. Tertanam sebuah "nilai" dalam jiwa masyarakat Jepang untuk selalu berbuat yang terbaik dan selalu bekerja keras. Bila tidak maka hasilnya akan sia-sia. Ketika orang menyebut Jepang, maka yang tergambar dalam benak manusia adalah kualitas terbaik hasil produksinya.

Kesungguhan hati untuk berbuat yang terbaik inilah hendaknya dapat kita terapkan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sebagai kalifah di muka bumi hendaknya setiap pekerjaan yang kita lakukan merupakan karya terbaik sebagai pertanggung jawaban kita kepada khalik dan sesama. Semoga ke depan, melalui dukungan semua elemen kampus dan pemerintah, Universitas Malikussaleh menjadi tuan rumah Six-University Initiative Japan-Indonesia (SUIJI). []

DESAIN EKONOMI ACEH

MEMBANGUN Aceh yang lebih baik salah satunya harus melalui desain ekonomi yang benar-benar menguntungkan masyarakat kelas bawah. Tidak mudah untuk menyusun desain ekonomi Aceh yang mampu membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh pascatsunami dan konflik.

Namun di atas cita-cita itu, desain ekonomi Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) harus benar-benar sesuai dengan visi dan misi. Zaini-Muzakir harus secara elegan menerjemahkan visi dan misi dalam bentuk implementasi program-program berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini tak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus dalam bentuk skala besar dan spektakuler untuk kemaslahatan rakyat Aceh.

Pemerintahan Zaini-Muzakir harus tahu program konkrit apa yang harus dilakukan untuk memajukan perekonomian Aceh. Dalam sebuah interview dengan salah satu media, saya memberi catatan bahwa pemerintah Aceh harus membuka peluang untuk mendesain ekonomi berbasis kerakyatan, kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi berbasis proposal yang hanya menguntungkan mereka yang ahli dalam bidang pembuatan proposal, seperti yang pernah berlangsung selama ini. Oleh karena itu, agar bisa meluruskan arah atau desain perekonomian Aceh ke depan, pemerintahan Zaini-Muzakir harus juga melakukan penguatan pendidikan ekonomi bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian, masyarakat pun bisa mendukung atau bertindak apa yang yang dicita-citakan pemerintah baru saat ini.

Melalui tulisan ini, saya memberikan 2 (dua) peluang yang perlu direspon oleh Pemerintahan ZIKIR agar selalu dikenang oleh kalangan bawah, yaitu pembangunan ekonomi berbasis *one district one product* dan desain implementasi berbasis ekonomi kawasan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat Aceh.

One District One Product

Desain ekonomi Aceh di bawah kepemimpinan ZIKIR sudah seharusnya berpedoman pada filosofi pembangunan ekonomi *one district one product*. Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus dirangsang atau harus dibina oleh Pemerintah ZIKIR secara kontinu selama 5 tahun ke depan. Pembinaan berbasis *one district one product* harus diarahkan untuk pengembangan potensi di masing-masing Kabupaten/Kota. Desain ini tentu saja harus dengan cara-cara analisa ekonomi yang berkelanjutan dan akan berdampak pada perubahan kualitas hidup masyarakat Aceh.

Pemerintah Zaini-Muzakir yang dipilih secara demokratis dalam Pilkada 2012 lalu, tentu tak mau kalah pamor dengan desain pembangunan pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang berbasis kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan biaya pendidikan anak yatim.

Saya melihat, dari awal pemerintahan ZIKIR memiliki niat yang menggelora untuk serius mendesain pembangunan pemerintahannya berbasis ekonomi. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan irigasi dengan skala besar dan berkualitas di seluruh Aceh.

Desain ekonomi Aceh di bawah ZIKIR harus berpedoman pada kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/Kota di Aceh. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan meluncurkan program ekonomi tahun 2013 dengan desain pembangunan ekonomi Aceh berbasis *one district one product*.

Ekonomi Kawasan

Dalam *field visit* (kunjunga lapangan) dalam rangka pemantauan kemajuan Proyek yang dibiayai oleh APBA, Senin (15/10) di Kucatacane, Aceh Tenggara. Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, mengatakan kepada masyarakat dan media bahwa 5 tahun ke depan selama pemerintahan ZIKIR (Zaini-Muzakir), semua kawasan di Aceh, baik kawasan ALA, ABAS dan Aceh pesisir harus dibangun dengan keadilan, pemerataan, keseimbangan dan integratif.

Muzakir menjelaskan, sebagaimana dikutip media bahwa salah satu strategi pembangunan Aceh ke depan yakni harus mampu mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor pembangunan yang selama ini terabaikan termasuk ekonomi pada wilayah Tenggara, tengah, Selatan dan Barat Selatan.

Desain pembangunan ekonomi kawasan ini menjadi prioritas selama 5 tahun ZIKIR. Pada sisi lain, ini akan berdampak pada mereduksinya semangat kelanjutan pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS. Menurut saya, resistensi akan besar sekali bila implementasi ekonomi kawasan ini tidak dijalankan selama 5 tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, rencana pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS nyaris lengkap semua unsur administrasi kecuali rekomendasi provinsi induk yaitu provinsi Aceh. Saat ini, rekomendasi tersebut terkendala dengan program moratorium pembentukan provinsi baru di Indonesia oleh pemerintah SBY.

Harus diakui bahwa cita-cita "merdeka" masyarakat kawasan Aceh Lauser dan kawasan Barat Selatan karena persoalan keadilan pembangunan ekonomi yang timpang. Ini sama ketika Aceh secara keseluruhan meminta "merdeka" dari pemerintah pusat, juga karena merasa tidak adil dalam pembangunan ekonomi.

Jadi, menerjemahkan statemen dari Muzakir Manaf dalam kunjungannya ke Aceh Tenggara dalam bentuk ekonomi kawasan ini akan membuka kerukunan pembangunan dalam lingkup Aceh yang utuh untuk selamanya. Namun jika selama 5 tahun ke depan, Pemerintah ZIKIR tidak mampu mewujudkan desain distribusi ekonomi kawasan yang adil, merata, seimbang dan integral maka "kemerdekaan" ALA dan ABAS tinggal menunggu momentum saja.

Akhirnya, masyarakat Aceh memiliki harapan besar pada kepemimpinan Zaini-Muzakir untuk berkonsentrasi pada bidang pembangunan ekonomi. Bila pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar populer dengan desain pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan dengan program JKA dan Program Beasiswa, maka Zaini-Muzakir harus menjadi idola bagi petani, pengangguran, masyarakat miskin dan penyandang status sosial yang kurang beruntung lewat program spektakuler dalam bidang pembangunan ekonomi. Saat ini, masyarakat menunggu-nunggu gerakan Zaini-Muzakir dalam implementasi hasil desain ekonomi Aceh ke depan. Sebuah desain ekonomi yang boleh disebut spektakuler. []

MENDORONG PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

KEHADIRAN bank syariah di Indonesia ditandai dengan dibukanya Bank Muallamat pada tahun 1992. Bank pertama menerapkan sistim perbankan syariah itu terbukti sangat tangguh ketika menghadapi krisis moneter 1997 silam. Di saat seluruh bank konvensional di negeri ini nyaris bangkrut, Bank Muallamat tetap santai menjalankan roda bisnisnya. Kebangkitan bank syariah kala itu bersamaan dengan kebangkitan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di Indonesia.

Fakta ini dijadikan renungan mendalam bagi pemilik bank konvensional, pada akhirnya mendirikan anak perusahaan berbasis syariah. Sehingga, tak heran akhirnya seluruh bank konvensional mendirikan anak perusahaan atau unit syariah pada bank tersebut. Ditambah lagi berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di sejumlah daerah termasuk Aceh.

Data Bank Indonesia Perwakilan Aceh menyatakan jumlah bank syariah dan konvensional di Aceh sampai akhir tahun lalu sebanyak 419 unit termasuk kantor cabang dan cabang pembantu. Perkembangan bank syariah di Aceh cukup baik, pada triwulan II tahun lalu, total aset perbankan syariah meningkat sebesar 34,88 persen. Meski tercatat melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan IV tahun 2012 sebesar 35,99 persen, namun pertumbuhan tahunan di atas 20 persen tersebut masih menunjukkan potensi berkembangnya bank syariah untuk melakukan pembiayaan dan berpartisipasi menjadi stimulus bagi perekonomian Aceh.

Kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan ketiga tahun lalu didominasi oleh simpanan tabungan proporsi sebesar 41,03%, disusul oleh deposito dan giro dengan proporsi masing-masing sebesar 32,54% dan 26,43%. Bila ditilik dari pertumbuhannya, tercatat simpanan giro mengalami pertumbuhan terbesar mencapai 172,01% (yoy).

Dari sisi pembiayaan, berdasarkan jenisnya, penyaluran pembiayaan konsumsi masih mendominasi dibandingkan dengan penggunaan kredit

lainnya. Minimnya risiko dalam penyaluran pembiayaan konsumsi tercermin dari rasio risiko pembiayaan non lancar (*Non Performing Loan*) yang masih di angka 2,74% per triwulan II tahun 2013, jauh dibawah NPL pembiayaan Modal Kerja dan Konsumsi. Sedangkan pembiayaan sektor produktif seperti modal kerja dan investasi masing-masing hanya 29,37 persen dan 7,42 persen.

Dari data itu, seharusnya perkembangan bank syariah di Aceh jauh lebih cepat mengingat provinsi ujung barat Sumatera itu memberlakukan syariat Islam. Pemandangan kontras terlihat antara bank konvensional yang dipenuhi puluhan masyarakat saban hari, sedangkan kantor bank syariah selalu sepi nasabah yang mengantre.

Masyarakat Aceh dipastikan mengetahui bahwa bunga bank itu riba (haram). Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2004 lalu telah mengeluarkan fatwa menyatakan bunga bank riba (haram).

Lambannya perkembangan bank syariah di Aceh setidak-tidaknya disebabkan dua faktor yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang operasional bank syariah dan minimnya jaringan bank syariah yang tidak menjangkau pelosok kecamatan seperti bank konvensional.

Dukungan Semua Pihak

Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang perbankan syariah dengan segala kelebihannya diperlukan dukungan semua pihak, baik itu pemerintah, ulama, asosiasi perbankan, perguruan tinggi, serta kelompok keuangan mitra bank (KKMB).

Pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebaiknya mengeluarkan seruan bersama kepada seluruh instansi pemerintah dan instansi pendidikan agar menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksi keuangannya. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan baru-baru ini mengeluarkan seruan agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di provinsi itu membuka rekening di bank syariah. Sehingga, pemerintah mentransfer gaji melalui rekening bank syariah yang dimiliki PNS. Langkah ini diambil untuk menghindari riba.

Sosialisasi seruan tersebut dilakukan oleh semua pihak. Jangan biarkan bank syariah berjuang sendiri memberi pemahaman pada masyarakat. Ulama bisa mengagendakan sosialisasi bank syariah melalui pendidikan di

dayah dan ceramah Jumat secara berkelanjutan. Sehingga, masyarakat Aceh faham tentang plus minus perbankan syariah.

Jangan sampai, seruan tentang perbankan syariah itu bernasib sama dengan Fatwa MUI No 1/2004 tentang bunga bank yang heboh sesaat lalu hilang ditelan zaman. Perlu konsistensi mensosialisasikan praktik perbankan syariah pada masyarakat.

Potensi lain yang bisa digunakan untuk mensosialisasikan sistem perbankan syariah adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Selama ini, KKMB terkesan berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, organisasi ini berperan besar menghubungkan UMKMK dengan perbankan. Bank Indonesia baik di Lhokseumawe dan Banda Aceh telah mendidik puluhan tenaga KKMB. Mereka tidak diberi gaji per bulan, hanya mendapat biaya jasa dari UMKMK yang berhasil mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Rata-rata kredit yang disalurkan melalui bantuan KKMB di Aceh sekitar Rp 5-Rp10 miliar per tahun. Jika mereka diberi sedikit insentif dari pemerintah daerah, tentu mereka bisa bekerja ekstra, mensosialisasikan jasa perbankan syariah pada masyarakat serta menghubungkan UMKMK pada bank syariah di Aceh. Sehingga penyaluran kredit bank syariah tidak lagi didominasi pembiayaan konsumsi, namun cenderung pembiayaan modal kerja pada UMKMK. Dampak lainnya, terciptanya lapangan kerja dan mengurai angka pengangguran yang dari hari ke hari semakin kusut di provinsi ini.

Persoalan lainnya adalah minimnya jaringan perbankan syariah di Aceh. Manajemen bank syariah harus menyakini bahwa kondisi keamanan di Aceh cukup kondusif untuk melakukan ekspansi kantor cabang atau kantor cabang pembantu dan mendekatkan layanan perbankan syariah pada masyarakat di kecamatan. Salah satu cara efektif mensosialisasikan perbankan syariah adalah memperlihatkan wujud bank syariah pada masyarakat di kota-kota kecamatan. Sehingga, masyarakat yakin bahwa bank tersebut benar ada dan dijamin keamanan uangnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masyarakat awam menganut idiom bahwa tidak ada kantor perbankan di kecamatan, menimbulkan kekhawatiran untuk menyimpan uang pada bank tersebut. Khawatir bank yang membuka kantor di pusat kabupaten tutup dan mereka tidak mengetahui nasib uang yang disimpan pada bank tersebut.

Forum Segi Lima

Terakhir perlu dibentuk forum segi lima yaitu pemerintah, Bank Indonesia, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), perguruan tinggi dan ulama untuk mendukung upaya pengembangan perbankan syariah di Aceh. Perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam dan mendirikan pusat penelitian perbankan bisa mencari akar persoalan lambatnya perkembangan syariah dan memberi alternatif solusi. Ulama bisa menyampaikan pada umat dengan metode dakwah masing-masing. Pemerintah bisa memberikan kebijakan terbaik untuk mendukung percepatan pengembangan bank syariah di Aceh.

Forum ini pula yang mengontrol konsistensi sosialisasi perbankan syariah rakyat dan mengajak pengusaha perbankan syariah untuk terus mendekatkan layanannya ke seluruh pelosok Aceh. Jika ini dilakukan secara berkelanjutan, maka lima tahun ke depan, Aceh menjadi model pengembangan syariah terbaik di negeri ini. Sudah saatnya, kita tidak hanya menerapkan syariat Islam sebatas wacana, namun minim praktik. Saatnya, kita menerapkan sistem perbankan syariah di *nanggroe* Iskandar Muda.

Pada akhirnya, kita bertanggungjawab untuk menghindarkan masyarakat menikmati hasil riba yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Salah satu hadis yang menerangkan riba diriwayatkan Ibn Majah berbunyi Rasulullah bersabda riba adalah tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.[]

BAB II

**EKONOMI PERADABAN
DALAM POLITIK**

RUNTUHNYA MODAL SOSIAL DI ACEH

KEHIDUPAN sosial pascatsunami dan konflik di Aceh sudah sangat mengkhawatirkan. Kehidupan sosial di Aceh saat ini boleh dikatakan mengalami sejumlah permasalahan sosial. Mulai dari degradasi moral siswa sampai runtuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan toleransi antar orang dewasa.

Sebelumnya, dalam banyak literatur sejarah Aceh disebutkan bahwa Aceh memiliki ciri khas dengan modal sosial yang hebat dalam bidang adat istiadat, pendidikan dan agama. Karena modal sosial yang hebat itu pula, Aceh selalu berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Indonesia "memanyungi" modal sosial Aceh itu dengan sejumlah perundangan.

Awalnya konsep modal sosial ini dipopulerkan oleh Puyyman dan Fukuyama yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan masyarakat. Di Indonesia konsep yang aslinya "*social capital*" diterjemahkan oleh sebagian sebagai modal sosial. Menurut Hasbullah (2006: 9–16), unsur-unsur pokok dari modal sosial adalah: 1) partisipasi dalam suatu jaringan masyarakat, 2) hubungan timbal balik (*reciprocity*), 3) kepercayaan (*trust*), 4) norma-norma sosial, 5) nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat, dan 6) tindakan yang proaktif.

Posisi Aceh yang hebat dengan modal sosial (*social capital*), ditambah dengan sikap "harga diri yang tinggi", menjadi salah satu senjata untuk "memberontak" melawan ketidakadilan pemerintah pusat. Namun kondisi Aceh saat ini, bagi pemerintah pusat tidak memiliki hubungan yang timbal balik (*reciprocity*) dengan Aceh. Karena Aceh telah damai, dan kekuasaan hari ini berada pada diri orang Aceh.

Makanya, masyarakat Aceh dalam segala kelebihanannya, selalu menganggap dirinya sebagai sebuah bangsa "*teuleubeh*" (baca: punya nilai lebih) baik dari segi pemikiran, pendidikan dan nilai-nilai sosial. Dan modal sosial ditata dalam pengelolaan masyarakat yang bernilai tinggi.

Di Aceh dulunya, modal sosial menjadi perekat dalam bertoleransi. Norma agama, sosial dan pendidikan menjadi aspek penting dalam segala kebijakan warga desa. Jika sebuah keluarga melakukan sebuah tindakan yang melanggar norma agama di sebuah desa, akan dianggap sebagai aib. Untuk hal ini, pasti akan ada modal sosial yang berperan memberi efek jera dan dipatuhi oleh semua warga. Dari setiap keputusan yang diambil para pemimpin desa akan dipatuhi dengan segenap hati.

Saat ini, beranjak dari berbagai fenomena sosial dari segi agama, adat istiadat dan pendidikan yang pernah dan sedang terjadi di Aceh, modal sosial (*social capital*) di Aceh seperti sudah runtuh berkeping-keping dalam gilasan gelombang tsunami dan konflik.

Sejatinya, menurut Ife dan Tesoriero (2003:3) modal sosial berfungsi sebagai "perekat" yang dapat menyatukan masyarakat dalam berhubungan antar manusia, kewajiban sosial sesamanya, dan solidaritas sosial antar warga. Menurut Ife dan Tesoriero, dengan adanya modal sosial dapat mengarahkan orang-orang untuk berbagi kekuasaan (*power sharing*) yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Inilah yang menyakitkan bagi kita di Aceh hari ini. Seakan-akan kehidupan bermasyarakat di Aceh sudah terlepas dari modal sosial. Rasa solidaritas sesama warga, rasa empati dan rasa kepedulian sesama warga sudah diganti dengan rasa keangkuhan dengan basis ekonomi. Kehidupan di Aceh hari ini, akan dihormati, disegani dan dimuliakan bila kita memiliki modal ekonomi yang mapan/tinggi. Tidak lagi berpedoman pada modal sosial dengan prinsip, saling berbagi dan saling peduli.

Degradasi Moral

Sikap dan kecintaan orang Aceh terhadap ilmu sangat tinggi dari masa ke masa. Salah satu modal sosial dalam sektor pendidikan adalah sikap elegan untuk mewakafkan sebagian harta masyarakat di Aceh untuk bidang pendidikan. Makanya tak heran, karena kuatnya modal sosial dalam sektor pendidikan, banyak dayah-dayah dan sekolah-sekolah di Aceh yang asal muasalnya dibangun di atas tanah wakaf dari warga.

Namun akhir-akhir ini, makin langka kita mendengar di Aceh ada wakaf untuk kepentingan pendidikan. Malah yang terjadi adalah sejumlah praktik

penyegelan sekolah, tawuran dan degradasi moral peserta didik yang mulai mengancam eksistensi tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Hari ini, yang terjadi adalah pemimpin saja tidak diikuti seruannya oleh peserta didik dan warga. Bahkan bila ada isu yang negatif terhadap pemimpin langsung disulut oleh warga lainnya. Sehingga bermuara kepada sikap anarkis para pihak. Setiap muncul pencerahan atau ada gagasan baru di Aceh yang dimunculkan seorang pemimpin, selalu direspon dengan sikap saling curiga dan mencurigai.

Di sisi lain, kondisi generasi masa depan Aceh yang mengalami degradasi moral semakin tajam. Membuat sendi-sendi kehidupan yang baik semakin sirna (memudarnya modal sosial). Tatanan kehidupan yang semakin merosot ini dapat juga diartikan sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan warga desa, dalam membentuk keharmonisan kehidupan yang baik sesama warga dan elit.

Pemerintah ikut andil besar dalam degradasi moral anak bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam implimentasi pendidikan nasional, hampir tidak memiliki karakter yang jelas untuk melahirkan kualitas generasi yang berbasis keilmuan dan moralitas.

Tidak mengherankan kalau di era reformasi ini kita semua membiarkan perkembangan kebebasan diterjemahkan masing-masing untuk kepentingan golongan masing-masing pula. Tidak ada lembaga yang bisa mengarahkan dan membimbing kepada kemaslahatan umat secara massif dan holistik. Reformasi pun menjadi kebablasan.

Mengakhiri tulisan ini, saya mengusulkan ada dua hal kecil yang dapat kita lakukan bersama-sama memperbaiki kondisi degradasi moral anak bangsa. *Pertama*, adanya gerakan penanaman nilai-nilai etika dan moral dalam bentuk yang strategis dalam semua jenjang studi pendidikan di Aceh. *Kedua*, diperlukan gerakan revitalisasi modal sosial yang mulai runtuh pasca tsunami dan konflik secara proaktif.[]

MENGISI WALI NANGGROE

DISKURSUS keberadaan Wali Nanggroe belum juga usai. Hal semacam ini menandakan harapan lebih dari kehadiran Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan lokal di Aceh. Karena harapan dalam perspektif kebaikan Aceh, tentu semua elemen harus berpikir ekstra keras supaya kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak menimbulkan 'huru-hara'.

Untuk itu, tak salah bila para cendekiawan Aceh ikut memberi kontribusi pemikiran menyangkut Wali Nanggroe. Maju dan mundurnya Aceh, juga tak bisa lepas dari peran cendekia kampus, dayah dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, penyatuan visi dalam melihat Aceh sebagai sebuah identitas dan entitas kebangsaan bersama harus diberi dukungan dan apresiasi.

Secara pribadi, saya termasuk yang berpikir rasional. Artinya kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak selalu harus dikaitkan dengan kekuatan politik semata. Saya melihat, keberadaan Wali Nanggroe harus benar-benar menjadi lembaga kebudayaan.

Karenanya, diskursus Wali Nanggroe harus keluar dari cara berpikir setuju *versus* tidak setuju, melainkan harus diarahkan kepada substansi kemaslahatan secara komprehensif terkait keberadaan Wali Nanggroe. Dalam artian apa dan bagaimana pola kerja Wali Nanggroe harus didiskusikan untuk kemaslahatan semua etnik di Aceh.

Perdebatan dalam ranah politik yang muncul antar lembaga pemerintah menyangkut Wali Nanggroe setidaknya perlu segera direduksi. Apalagi perdebatan di level rakyat *versus* rakyat eskalasinya juga terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa diskursus Wali Nanggroe tidak berjalan pada fase substantif. Melainkan terus-terusan berjalan pada rel simbolik, setuju *versus* tidak setuju. Kalau cara pandang seperti ini, saya khawatir Pemda Aceh tidak akan maksimal meningkatkan kinerjanya, bila masih diselimuti persoalan-persoalan simbolik.

Lembaga Kebudayaan

Aceh pascatsunami dan konflik, masih banyak ruang kosong yang perlu diisi secara bersama-sama. Salah satunya adalah ruang kebudayaan. Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 2013 silam, menjadi bukti bahwa ruang kebudayaan di Aceh perlu dikelola secara baik, sistematis dan profesional. Untuk mencapai hasil yang maksimal, sistematis dan profesional, maka PKA ke depan harus benar-benar berlangsung atas sendi-sendi kebudayaan Aceh yang benar, dan bukan sekadar kebudayaan *tong setan*. Maka Lembaga Wali Nanggroe memiliki peluang untuk menjadi pionir.

Ke depan, Lembaga Wali Nanggroe (LWI) harus benar-benar difungsikan sesuai dengan tupoksinya (tugas, pokok dan fungsi, *ed*). Dan keberadaan Wali Nanggroe bukan menjadi milik sekelompok masyarakat, melainkan harus menjadi milik semua strata masyarakat Aceh.

Karena itu, sudah sepatutnya Lembaga Wali Nanggroe tak hanya diisi oleh satu kelompok saja, melainkan harus melibatkan semua elemen masyarakat Aceh yang memiliki kapasitas keilmuan dan ketokohnya. Masyarakat Aceh punya hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi pembangunan Aceh yang lebih baik dan bermartabat. Sehingga dengan kehadiran Lembaga Wali Nanggroe, masyarakat dapat didorong untuk mengisi pembangunan Aceh secara bersama-sama.

Secara kepemimpinan juga Lembaga Wali Nanggroe harus dipimpin secara kolektif kologial, bukan menonjolkan personal seseorang. Dengan sistem pengambilan keputusan kolektif kologial, maka Lembaga Wali Nanggroe akan terhindar menjadi lembaga *super body* Pemerintah Aceh di bawah Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Spirit Persatuan

Secara pribadi pula, saya melihat spirit awal lahirnya Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai pemersatu. Maka tidak ada pilihan untuk melawan dari spirit yang mulia seperti itu. Spirit pemersatu harus benar-benar ditelurkan secara sistematis. Jika tidak, ini akan menjadi umpan balik yang dapat membahayakan eksistensi Aceh.

Ada beberapa poin yang perlu dilakukan oleh Wali Nanggroe setelah disahkan, sebagai upaya menjaga spirit pemersatu.

Pertama, hal yang bisa dilakukan oleh Wali Nanggroe segera mungkin setelah dilantik adalah menyelenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Musyawarah itu perlu dilakukan dengan melibatkan semua unsur tokoh adat, budaya dan agama. Tujuannya supaya Lembaga Wali Nanggroe menjadi lembaga dihormati.

Kedua, harus menempatkan personil-personil dalam struktural Wali Nanggroe yang memiliki ilmu agama tinggi dan berkarisma dalam kehidupan sosial politiknya. Keberadaan mereka dapat membuat Lembaga Wali Nanggroe semakin berwibawa dan bermartabat.

Ketiga, segera setelah disahkan menjadi Wali Nanggroe dan pesonil yang terlibat dalam stukturanya harus keluar dari Partai Politik. Karena Wali Nanggroe dan personil dalam struktur harus diisi oleh orang-orang yang independen untuk dapat mewujudkan spirit sebagai pemersatu Aceh. Hal ini untuk menghindari tuduhan bahwa Lembaga Wali Nanggroe hanya diisi oleh satu kelompok saja.

Keempat, dalam struktur Lembaga Wali Nanggroe harus memiliki keterwakilan daerah, karena Aceh memiliki ragam perbedaaan dalam kebudayaan dan sosial. *Kelima*, Lembaga Wali Nanggroe menjadi lembaga penengah dalam setiap kemelut warga baik terutama menyangkut persoalan-persoalan sosial budaya dan keagamaan. Bukan hanyamenjadi penengah dalam polemik antar lembaga pemerintah dan politik praktis.

Kita harus berhenti memperdebatkan personalitas Wali Nanggroe. Karena kalau itu terus diperdebatkan, banyak energi yang akan terkuras. Sudah saatnya, semua elemen bangsa untuk berpikir supaya kelembagaan Wali Nanggroe benar-benar dapat membawa manfaat bagi kemakmuran Aceh. Ini juga untuk menghindari masyarakat memperdebatkan soal-soal simbolik.

Simbolisme kadang kalanya mengalahkan makna hakiki sesuatu yang dicita-citakan. Makanya gerakan bermotif simbolik biasanya tidak memiliki nilai berkelanjutan dalam setiap gagasan dalam pembangunan. Untuk itu, semua elemen rakyat Aceh harus memberi kontribusi dalam mengisi pembangun Aceh saat ini. Aceh ke depan harus bisa berdiri sendiri secara mandiri. Aceh harus bisa berlari cepat dalam meninggalkan beragam ketertinggalan. Salah satu alatnya tentu melalui Wali Nanggroe.[]

BELAJAR DARI HIROSHIMA

KUNJUNGAN kerja ke Jepang kali ini, saya didampingi Pembantu Rektor Iskandar Zulkarnaen. Saya diundang menghadiri acara Six University Initiative Japan–Indonesia (SUIJI). Ini adalah kunjungan kerja yang harus direspon dalam upaya membangun eksistensi Universitas Malikussaleh ke depan dalam pencatutan akademis berbasis lokal, nasional dan internasional.

Berangkat melalui Bandara International Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, 25 Agustus 2013 menuju Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kami menggunakan maskapai penerbangan Malaysian Airlines (MAS) dan tiba di Jepang pada 27 Agustus 2013.

Di Jepang, kami memiliki beberapa agenda dengan sejumlah Universitas. Salah satunya di Kochi University mengikuti pertemuan SUIJI (Six University Initiative Japan–Indonesia). SUIJI adalah konsorsium 6 rektor yang mendeklarasikan inisiatif di Bali pada 7 Agustus 2010 yang lalu. Fokus aktivitas konsorsium ini adalah mendukung ketahanan pangan dunia melalui kerjasama perguruan tinggi Indonesia–Jepang. Kegiatan yang dilaksanakan berupa riset bersama, *joint degree* dan kegiatan pelayanan berbasis komunitas.

Selanjutnya kami singgah di Hiroshima, mengunjungi beberapa University di sana untuk memperkenalkan Universitas Malikussaleh. Kota Hiroshima adalah kota penuh kenangan sejarah bagi warga dunia. Makanya sampai saat ini sejumlah lokasi wisata, seperti Monumen Perdamaian Hiroshima, Istana Hiroshima dan lainnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Hiroshima.

Kita harus belajar banyak dari semangat hidup warga Hiroshima. Bagaimana tidak. Setelah luluh lantak dibombardir 3.5 ton bom atom oleh

Amerika Serikat. Hiroshima dapat bangkit, melawan ketidakberdayaan dengan kemegahan teknologi yang dimilikinya saat ini.

Kita dibuat kagum dengan etos kerja warga Hiroshima dan Jepang umumnya. Mereka dapat bangkit dari keterpurukan. Kita bisa membayangkan efek yang ditimbulkan setelah serangan Bom Atom adalah penderitaan berkepanjangan dari generasi ke generasi akibat radiasi kimia, dengan dampak genetika. Bom atom yang jatuh di Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada 9 Agustus tahun 1945.

Sejarah mencatat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Hiroshima ikut hilang ditelan bom atom yang menankutkan itu, kita berpikir Hiroshima akan menjadi kota mati. Namun mereka dapat bangkit dengan filosofi kebersamaan. Kesamaan tekad dan keinginan tersebut membuat pemerintah dapat membangun kembali kota Hiroshima secara cepat dan tepat sasaran. Salah satu unsurnya adanya pelibatan warga secara sukarela.

Kecerdasan pikiran yang mereka miliki, tidak banyak dialokasikan untuk saling mengkritik setiap fase pembangunan yang dilakukan Pemerintah akibat dari bom atom. Namun masyarakat Hiroshima lebih bangga bila mereka bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.

Kaum-kaum intelektual yang tersisa dari bom mematikan itu, benar-benar difungsikan dengan baik oleh Pemerintah sebagai peneliti yang baik dan penuh dengan etos. Sebagian hasil penelitian dari insan kampus, benar-benar diimplimentasikan oleh pemerintah setempat. Karena ada rasa saling percaya antar pemerintah dengan insan kampus.

Bagi masyarakat Jepang secara umum, mereka masih percaya bahwa suatu program yang baik dan bernilai harus berdasarkan hasil penelitian. Makanya banyak hasil-hasil teknologi yang lahir dari Jepang, berasal dari gagasan insan kampus mereka sendiri.

Hal ini setidaknya menjadi catatan tersendiri bagi kita insan kampus dan pemerintah Aceh. Pengalaman Hiroshima benar-benar menjadi inspirasi kolektif dalam membangun Aceh pascakonflik 30 tahun dan hentakan tsunami 2004.

Pembangunan Aceh yang baik harus berlandaskan penelitian. Hal itu telah terbukti dari konsep pembangunan Hiroshima. Aceh harus dibangun demikian, bukan berlandaskan bisikan dan *kawom* (politik kawom). Bila pembangunan Aceh di bawah Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf tidak melibatkan periset-periset handal dari insan kampus dalam setiap perancangan pembangunan, maka Aceh tidak menjadikan pembanguan Hiroshima sebagai inspirasinya.

Kalau konflik dan tsunami tidak kita jadikan sebagai inspirasi kolektif antar warga, akademisi, pengusaha, dan ulama dalam setiap pembangunan Aceh, kita takutnya hal ini akan menjadi batu sandungan dalam derap pembangunan Aceh ke depan. Karena itu, sudah sepatutnya kita harus belajar dari Hiroshima.[]

ACEH DALAM WACANA DISINTEGRASI

GEJOLAK disintegrasi Aceh kembali menjadi sajian utama di media massa sepanjang April-Mei 2013. Bedanya kalau dulu sifatnya vertikal antara Aceh dengan Pemerintah Indonesia, saat ini alirannya Horizontal: antara sesama masyarakat Aceh. Kalau dulu alat perjuangannya GAM dengan alasan ketidakadilan. Saat ini alatnya ALA (Aceh Leuser Antara, *ed*) dan ABAS (Aceh Barat Selatan, *ed*) dengan alasan sama, yaitu ketidakadilan. Ujungnya bermuara pada tuntutan “kemerdekaan” dalam wacana disintegrasi Provinsial.

Ikhwal disintegrasi tentu bermuara pada pembagian kekuasaan berbasis ekonomi. Pemerataan dan keadilan pada sektor ekonomi menjadi dominan dalam munculnya gerakan pewacanaan pemisahan ALA dan ABAS. Kemunculan dan tenggelamnya wacana disintegrasi provinsi Aceh tentu akan menjadi batu sandungan dalam pengembangan Aceh ke depan. Pemangku kepentingan harus hati-hati dalam merespon dan mengelola pewacanaan disintegrasi Aceh. Karena kalau wacana ini tidak dikelola secara holistik dan berbasis keadilan, tentu akan menjadi wacana massif yang meresahkan ketentraman politik sosial di Aceh.

Pemulihan ekonomi paska konflik di Aceh sangat penting dilakukan, untuk mengembalikan harapan masyarakat setelah menderita selama konflik berkepanjangan. Pengembalian kondisi itu harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan objektif. Karena konflik selalu ada kaitannya dengan distribusi kekayaan dan kekuasaan.

Kalau distribusi kekuasaan yang telah diperoleh GAM melalui Pilkada (pemilihan kepala daerah, *ed*) tidak mampu memberikan dampak yang menyeluruh bagi warga Aceh keseluruhan. Maka, akibatnya bukan saja terjadi disintegrasi Aceh, melainkan akan membawa Aceh pada gelombang “perang” saudara antar elemen (etnik) masyarakat Aceh.

Menurut Zulfan Tadjoeeddin (2011), setidaknya ada enam (6) risiko paska konflik; pengangguran, distribusi pembangunan yang tidak merata, pengelolaan sumber daya alam yang didominasi oleh "pemain" baru, kontrak sosial, transformasi sosial, dan biaya yang tinggi untuk kelas baru.

Karena esensinya, konflik bagian dari natural kehidupan manusia, maka konflik inheren dengan manusia. Konflik selalu meninggalkan dampak yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Paul Collier, Anke Hoeffler and Mans Soderbom (2006:2) mengungkapkan bahwa masyarakat pasca konflik selalu menghadapi dua tantangan yang berbeda, yaitu pemulihan ekonomi dan pengurangan risiko. Perdamaian pasca-konflik biasanya rapuh, sekitar setengah dari semua perang sipil paska konflik kambuh kembali.

Belajar dari konflik Aceh, kehidupan sosial di Aceh seperti siklus dalam dominasi konflik dan damai. Siklus konflik dan damai masyarakat Aceh selalu lahir baik bersifat vertikal (Aceh dengan pemerintah Pusat), maupun horizontal (masyarakat Aceh versus masyarakat Aceh).

Tatanan masyarakat Aceh selalu berjalan secara sistematis dalam lingkaran "Konflik-Damai". Siklus itu terus berputar baik *by design* maupun secara alamiah. Ketika siklus berada pada ranah konflik, semua potensi "merapat" untuk berfikir bagaimana mengupayakan damai. Begitu juga sebaliknya, ketika kondisi Aceh berada pada titik damai, ada saja baik secara sengaja atau tidak, "merapat" untuk kembali ke konflik.

Risiko paska konflik di Aceh akan berbentuk konflik horizontal. Aceh dihadapkan pada kerentanan konflik kewilayahan horizontal antara wilayah Provinsi dengan wilayah kedaerahan kabupaten/kota. Indikasi konflik horizontal sangat rentan untuk eksistensi damai dan akan merusak sendi-sendi struktur masyarakat Aceh.

Analisis ini diperkuat dengan laporan International Crisis Group mengenai GAM Vs GAM dalam Pemilu Aceh 2011. Artinya konflik Aceh ke depan akan lebih berdampak sosial karena yang muncul adalah konflik horizontal, yaitu konflik sesama GAM, sesama orang Aceh, atau etnik yang berada di Aceh.

Soft Power

Kalau Pemerintah Indonesia mampu melakukan pendekatan *soft power* dalam menyelesaikan konflik Aceh, maka kita percaya bahwa Gubernur Aceh lebih mampu melakukan *soft power* untuk mempertahankan integrasi

Aceh. Gubernur dengan kewenangannya harus mampu melakukan kontak "*people to people*" baik yang mengagagas ALA maupun ABAS. Cara-cara *soft power*, akan lebih mudah diterima dan mampu meredam potensi konflik sosial di Aceh.

Kita percaya, kalau Gubernur Aceh melakukan pendekatan-pendekatan yang berbasis *soft power*, maka elemen-elemen ALA dan ABAS maupun lainnya akan mereduksi kampanye-kampanye yang berakhir pada disintegrasi Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh harus mundur satu langkah untuk menggapai kemenangan beberapa langkah bagi semua elemen masyarakat Aceh.

Saat ini, terlihat bahwa gerakan ALA dan ABAS benar-benar menjadi batu sandungan dalam implementasi program Gubernur Aceh. Gubernur sendiri harus mengambil alih untuk meredamnya, apalagi ini sudah menjadi titik puncak dari perbedaan. Kita berharap semua pihak harus mundur selangkah untuk meraih "kemerdekaan" yang sebenarnya, bukan berdasarkan simbol-simbol kedaerahan.

Wacana bahwa jika Pemerintah Aceh memaksakan bendera "bintang bulan" menjadi simbol bendera daerah Aceh, maka pemerintah pusat tak "memberi jaminan" Aceh akan tetap utuh perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Pasalnya, desakan lahirnya Provinsi ALA dan Provinsi ABAS menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Makanya Gubernur Aceh harus arif dan bijaksana dalam menangani pusaran potensi konflik. Gubernur harus mempergunakan kewenangannya untuk kemaslahatan bersama. Sehingga polemik simbol itu, tak menggiring Aceh kembali ke pusaran konflik.

Mudah-mudahan kita tidak terbuai dengan hadis yang tak jelas riwayatnya mengenai "perbedaan itu adalah hikmah". Karena dalam pandangan saya di Aceh, setiap adanya perbedaan bukan hikmah yang kita dapat, melainkan perbedaan yang berakhir pada "pemberontakan".

Ikhtitam

Eksistensi Aceh sebagai sebuah provinsi menjadi sangat berharga bila wacana disintegrasi Aceh dapat diredam secara sistematis dan holistik. Tentu ini harus melalui pendekatan-pendekatan yang *soft power*. Tidak harus melalui pendekatan yang *hard power* yang dapat membawa malapetaka untuk rakyat Aceh secara keseluruhan.

Perdamaian Aceh ini benar-benar harus dikelola untuk kemaslahatan semua warga dan semua etnis yang ada di Aceh. Karena dengan kebersamaan dan rasa kepemilikan bersama, Aceh akan mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Hari ini, di bidang kebijakan ekonomi dan politik, perdamaian Aceh belum mampu terlihat mandiri. Hal ini sangat terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan belum selesai di level pemerintah pusat.

Pembangunan Aceh paska konflik harus melibatkan semua elemen. Artinya kepemimpinan politik untuk Aceh hak semua etnis yang ada Aceh. Pembangunan Aceh paska konflik harus dibangun dengan spirit kebersamaan tanpa berpihak kepada siapa pun, melainkan harus berpihak kepada rakyat Aceh. Aceh adalah milik orang Aceh secara keseluruhan dengan segala etnis dan keragaman budayanya. Semoga Aceh tetap utuh demi kemenangan bersama.[]

PEMBANGUNAN BERBASIS EMPAT PILAR KEBANGSAAN

DISKURSUS pembangunan berbasis empat (4) pilar pembangunan itu penting, dalam upaya memperkuat jati diri kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur.

Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah bagian dari menyakini sebuah kebenaran terhadap eksistensi bangsa. Untuk itu, kita harus memiliki komitmen untuk mewujudkan sebuah pandangan hidup itu dalam bentuk nilai-nilai yang berdampak bagi sosial kemasyarakatan.

Komitmen kebangsaan secara eksplisit telah diatur dalam UUD 1945 pada rumusan pasal yang menegaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Selain itu, juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang substansinya antara lain mempertegas tentang perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional.

Kesadaran Empat Pilar

Kita harus sadar, berbicara 4 pilar kehidupan bernegara meliputi Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar itu semuanya adalah bagian dari cita-cita refromasi bangsa kita untuk

memperjuangkan kehidupan yang adil bagi rakyatnya. Memperjuangkan kehidupan yang baik dan berkualitas untuk semua elemen masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari beragam etnik, agama, budaya dan bahasa. Keragaman itu tumbuh secara subur di dalam interaksi sosial masyarakat kita. Keragaman yang ada itu diakui sejak dahulu hingga sekarang ini. Keragaman itu pula yang menjadikan bangsa kita sebagai sebuah bangsa yang besar, yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Di era globalisasi ini banyak fenomena yang kita rasakan dan dapat dijadikan tolak ukur, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar tersebut mulai memudar. Memudarnya rasa kebangsaan, dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang melupakan budaya bangsa dan lebih memilih budaya barat sebagai gaya hidup mereka, bahkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air sudah jarang didengungkan.

Masalah bangsa yang paling memprihatinkan terutama justru melibatkan generasi muda karena pengaruh negatif globalisasi di Indonesia. Pengaruh ini telah memberikan dampak kemerosotan moral bangsa yaitu maraknya peredaran narkoba, tawuran antar pemuda, pornografi dan pornoaksi.

Apabila hal ini kita biarkan begitu saja tentu akan semakin menenggelamkan bangsa ini ke dalam kemerosotan nilai-nilai moral, dan dalam jangka panjang martabat bangsa kita akan semakin terpuruk.

Nilai-nilai dalam 4 pilar tersebut harus kita jadikan sebagai tuntunan moral, yang harus kita jabarkan untuk dijadikan menjadi norma moral, norma hukum dan norma etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sesungguhnya, secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi pembangunan Indonesia ke depan.

Kita harus percaya, bahwa kemandirian, keamanan, kesejahteraan dan kesuksesan akan terwujud bila kita memiliki landasan ideologi, konstitusi dan komitmen kebangsaan yang kuat, serta menghargai kebhinnekaan sebagai modal kekuatan bangsa kita.

Di atas segalanya, perkenankan saya memberi apresiasi kepada kita semua dalam menghargai setiap keberagaman adalah sebagai kekuatan

dalam berbangsa. Memang, era reformasi telah membawa kita pada fase degradasi dalam bidang moral, ditambah sikap egosentris keragaman dalam bentuk perpecahan. Namun itu semua harus kita landasi secara komprehensif untuk mengampanyekan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar ini kepada negara bangsa secara sistematis dan holistik. Mudah-mudahan hal ini akan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran moral secara total.[]

IHWAL NILAI KEBANGSAAN

SEJAK empat tahun lalu, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat, *ed*) gencar melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan: UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lembaga tinggi negara ini sangat sadar bahwa upaya sosialisasi empat pilar kebangsaan itu belum cukup ampuh memberikan pemahaman kepada 237,6 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau dari sekitar 500 suku.

Kesadaran itu sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh tiga hal: menurunnya nilai-nilai kebangsaan; apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kembali nilai kebangsaan itu; dan upaya perguruan tinggi merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan itu.

Pertanyaan itu awalnya sudah terjawab oleh bangsa ini saat kita sepakat mengakhiri sistem otoriter menjadi sistem demokrasi lewat Reformasi 1998. Namun, euforia reformasi berlangsung tak terkendali sehingga menimbulkan salah tafsir tentang makna kebebasan.

Kebebasan yang kebablasan ini berakibat pada kekerasan antarsuku, antarkampung, antarkelompok agama, antar-pendukung partai di berbagai pelosok negeri. Padahal, seluruh elemen sepakat, kebebasan yang ingin dicapai adalah bebas dari rasa takut, bebas menyampaikan pendapat, dan tegaknya supremasi hukum.

Perlu diingat, negara ini bukan negara monarki, bukan pula negara agama, melainkan negara konstitusional, yakni negara hukum yang demokratis (Adnan Buyung Nasution, 2012). Ketika kekerasan antarkelompok terjadi, timbul korban jiwa dan harta, ramai-ramai pejabat negara membantah bahwa kekerasan itu disebabkan dendam lama antarkelompok atau segudang alasan lain.

Tidak ada pejabat negeri ini yang mengakui bahwa negara alpa pada salah satu pilar kebangsaannya: berbeda-beda, tetapi satu juga. Seharusnya

pejabat sadar, bangsa nenek moyang kita sangat menghormati pluralisme.

Peristiwa kekerasan antarkelompok seharusnya menjadi bahan renungan untuk mengevaluasi kesadaran masyarakat bahwa kita berada di negara kepulauan dengan ratusan suku dan budaya berbeda. Idealnya suku dan budaya berbeda itu menjadi potensi kemajuan bangsa, bukan sebaliknya, menjadi ancaman terhadap ketahanan negara.

Keharmonisan suku dalam negara tertentu menjadi daya tahan bangsa dari ancaman dalam dan luar negeri. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa menghargai perbedaan antarsuku di dalamnya. Kekuatan itu dengan cara menyatukan perbedaan itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.

Supremasi hukum

Persoalan lainnya adalah supremasi hukum. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih berlangsung di Indonesia. Gayus Tambunan bisa pelesiran ke sejumlah negara meski statusnya terpidana merupakan bukti nyata bahwa hukum tumpul kepada mereka yang kaya dan bisa "membeli" pendekar keadilan kita. Sebaliknya, Nek Minah (55) di Purwokerto, Jawa Tengah, harus duduk di kursi pesakitan hanya karena mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan.

Persoalan hukum semakin akut ketika puluhan kepala daerah, anggota DPR, polisi, jaksa, hakim, sampai pengacara terlibat dalam kasus korupsi. Mereka menyandang status tersangka dan terdakwa kasus korupsi, tapi masih bisa unjuk gigi mengenakan pakaian mode terbaru dan bangga tampil di layar televisi.

Realitas ini melingkupi krisis kepercayaan anak negeri pada penegakan hukum di negara *gemah ripah loh jinawi*. Ini pula yang menyebabkan pudarnya nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat. Rakyat butuh contoh suri teladan dari aparaturnegara. Bukan terjepit di antara kokohnya tangan-tangan mereka yang berkuasa.

Pemerataan pembangunan juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin bangsa. Sebagai negara kepulauan, sudah sepatutnya semua provinsi di Indonesia mendapat pemerataan pendidikan berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta layanan kesehatan yang baik sehingga setiap orang bisa merasakan bahwa negara hadir ketika mereka membutuhkannya.

Rakyat mencintai negaranya karena negara juga memberi hak kepada rakyat sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa infrastruktur lembaga pendidikan di kawasan teras Indonesia seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua hingga kini belum memadai. Masih ditemukan sekolah yang rentan roboh. Selain itu, kompetensi guru dan dosen juga belum sebanding dengan provinsi di Jawa sehingga ketika lembaga pendidikan di Jawa sudah berpikir *go international*, kawasan teras Indonesia masih terseok-seok mengejar ketertinggalan dan berusaha setara dengan provinsi lainnya.

Menghias rumah

Atas ironi ini, perlu dicari solusi. Pemerintah pusat harus berpikir dengan logika "menghias rumah": mempercantik teras agar indah dilihat tamu dan tetangga, juga mengatur bagian dalam rumah agar tamu nyaman di dalamnya.

Cita-cita mulia yang dirumuskan pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sebatas teks keramat buat anak cucu, tetapi harus direalisasikan kepada generasi berikutnya sehingga rakyat merasa bahwa negara ini benar-benar telah menjalankan sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, sosialisasi empat pilar kebangsaan perlu dimulai dari lembaga negara, bukan dimulai dari TK sampai mahasiswa. Kita perlu revitalisasi nilai-nilai kebangsaan sekarang bukan hanya untuk masa datang. Penanaman nilai kebangsaan wajib dimulai dari atas. Masyarakat merindukan suri teladan, yang diwujudkan dari kinerja aparatur negara yang memberi rasa nyaman kepada anak bangsa.

Sebagai lembaga pendidikan yang diisi kaum terpelajar, sudah seharusnya perguruan tinggi di seluruh Indonesia menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada mahasiswa dan sivitas akademiknya. Beberapa universitas di Indonesia sudah membuat Pusat Studi Kebangsaan. Pusat studi ini mengkaji dan mencari formulasi cara tepat menyosialisasikan pilar kebangsaan agar efektif dan efisien supaya masyarakat benar-benar paham makna pilar kebangsaan itu sendiri.

Menanamkan pilar kebangsaan kepada generasi muda butuh waktu.

Dampaknya baru bisa dirasakan 5-10 tahun mendatang.

Karena itu, mari merenung dan meresapi apakah kita sudah memahami pilar kebangsaan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara? []

BAB III

EKONOMI PERADABAN DALAM PENDIDIKAN

UNIMAL MENUJU GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

PERKENANKAN saya mengajak kita semua untuk beranjak berpikir dasar-dasar filosofis dalam membangun Universitas Malikussaleh (Unimal). Hal ini penting untuk kemajuan Unimal sehingga memiliki dasar-dasar yang kuat sebagai sebuah universitas.

Kita merasa bangga dengan Universitas Malikussaleh ini. Pada usia yang masih relatif muda, Universitas Malikussaleh terus melangkah pada jalur yang benar. Jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good University Governance*. Profesionalisme, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan kerjasama menjadi prinsip utama dalam membangun kampus Universitas Malikussaleh, saat ini dan di masa-masa mendatang.

Tahun 2012 lalu, kita baru saja sukses menjadi tuan rumah konferensi internasional. Setidaknya ada 16 delegasi negara di dunia ikut serta dalam konferensi *International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies* (ICAIOS) ke-4. Bukan saja itu, sejumlah terobosan mengikat kerjasama dengan sejumlah kampus dan perusahaan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Amerika Serikat, Jepang dan di Asia Tenggara terus dilakukan. Itulah salah satu wujud Unimal menuju *Good University Governance*. Itu semua tak lepas dari peran serta semua elemen civitas akademika.

Kita bisa bayangkan, ketika awal-awal kami memimpin sebagai Rektor Universitas Malikussaleh, semuanya berada pada situasi yang perlu adanya respon dan pembenahan secara cepat, terutama untuk perbaikan tatakelola manajemen kampus yang lebih baik. Saat ini, sejumlah perbaikan tatakelola manajemen kampus mulai membaik. Hal ini menandakan kita berada pada jalur yang sesuai dan terkendali.

Ke depan, terobosan-terobosan spektakuler akan mudah kita lakukan, kalau tata kelola manajemen kampus sudah berjalan sesuai dengan

aturannya. Sehingga apapun programnya bisa dilakukan dengan mudah. Di sinilah letak esensi sebuah kerjasama yang baik, untuk proses yang bagus dengan hasil yang bermutu.

Unsur penting lainnya yang terus dibenahi oleh Universitas Malikussaleh adalah peningkatan sumber daya dosen. Kita baru memiliki 3 orang Guru Besar. Saya percaya dalam 1-2 tahun ke depan Guru Besar akan terus bertambah. Harapan ini tak berlebihan, karena saat ini Unimal Memiliki 50 lebih tenaga Doktor aktif pada semua bidang keilmuan. Sumber daya dosen bergelar doktoral terus bertambah setiap tahun. Sebagian di antara mereka sedang dalam proses *finishing* disertasi.

Kita harus saling mendukung, supaya budaya akademis terus tumbuh dan berkembang di Unimal. Saya membayangkan kampus ini pada usia 20 tahun akan tumbuh menjadi kampus yang membawa perubahan yang signifikan untuk masyarakat Aceh. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil, karena kita memiliki budaya akademik yang kondusif.

Kita harus percaya, bahwa Unimal salah satu barometer kemajuan Aceh di wilayah pesisir ke depan. Dosennya menjadi pembaharu, mahasiswanya menjadi agen perubahan, dan Rektornya sendiri harus menjadi pemimpin inspiratif.

Ini penting, agar para rektor tidak menjadi rektor-rektor administratif, seperti ditulis Guru Besar UI, Profesor Rhenald Kasali di Kompas, Agustus 2013 lalu. Saya sendiri, walau sesibuk apapun terus menulis, sebagai bagian dari *transfer of knowledge* sehingga menjadi inspirasi bagi dosen-dosen di Unimal lainnya.

Apa yang saya lakukan itu tak lain supaya saya tidak menjadi rektor-rektor administratif seperti yang digambarkan oleh Guru Besar Ilmu Marketing Manajemen dari UI tersebut. Karenanya, saya juga mendorong para dosen-dosen di Unimal agar terus menulis sesuai bidang keilmuan. Dengan demikian, dosen-dosen tak hanya menginspirasi mahasiswa, melainkan juga masyarakat pada umumnya.

Ke depan kita berharap, dosen-dosen yang bergelar Guru Besar, Doktor dan Magister dari Universitas Malikussaleh harus banyak terlibat, dalam setiap fase pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Peluang kerjasama tersebut selalu terbuka.

Hal ini sejalan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang mengamanahkan tanggung jawab ini. Makanya kita harus support dan mendukung terus setiap ada sumber daya dosen kita, dipakai oleh instansi pemerintah Aceh. Kami berprinsip, kontribusi yang baik adalah kontribusi yang bersifat *rahmatan lil alamin*.

Makanya tak ada alasan untuk tidak memberikan berkontribusi untuk kebaikan Aceh. Namun kami berharap, kewajiban dan hak-nya di Unimal tetap dipenuhi sebagaimana mestinya.

Ke depan Unimal memiliki peran sentral. Tidak hanya dalam bidang pendidikan murni, tapi juga pada bidang ekonomi dengan basis pendidikan. Setelah operasional PT Arun berakhir pada tahun 2014, maka Lhokseumawe dan Aceh Utara sebagai *petro dollar* hanya tinggal kenangan. Kondisi ini harus jauh-jauh hari menjadi perhatian kita bersama.

Kejayaan Sumber Daya Alam semakin lama kian pudar dan hilang, maka pilihan yang paling tepat adalah membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia. Keberadaan Unimal sebagai institusi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melahirkan manusia unggul yang berdaya saing. Manusia yang berdaya saing akan menjadi modal yang sangat signifikan dalam melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Dalam Al Quran, surat Ar Rahman, ayat 33, Tuhan berfirman, yang artinya *Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menjelajahi penjuru langit dan bumi, maka jelajahilah. Dan kamu tidak mampu menjelajahnya tanpa ilmu pengetahuan*. Begitulah pentingnya ilmu pengetahuan dalam meraih suatu keberhasilan.

Membangun pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak bagi pembangunan ekonomi tidak cocok lagi dengan slogan-slogan, tapi karya nyata yang perlu ditunjukkan. Sudah saatnya, pendidikan menjadi *leading sector* dalam pembangunan Aceh ke depan. Saat ini, hampir setiap negara telah menjadikan pendidikan sebagai bagian terpenting dalam melakukan perubahan di negaranya

Dalam hal ini, ada dua *domain* mendesak yang perlu dilakukan dalam penguatan pembangunan pendidikan Aceh. *Pertama*, manajemen dalam perspektif organisatoris sumber daya guru/dosen. *Kedua*, substansi yang

operasional seperti implementasi kurikulum yang *sustainable* dan berbasis karakter keacehan di setiap kampus dan sekolah di Aceh.

Sebelum mengakhiri sub bab tulisan ini, perkenankan saya memberi apresiasi kepada kita semua civitas akademika, Universitas Malikussaleh atas kerja keras yang harmoni untuk kemaslahatan dan kesehatan institusi ini.

Akhirnya selaku Rektor Universitas Malikussaleh, saya menitipkan pesan agar semua elemen menjadi lebih inspiratif untuk kepentingan membangun Unimal secara holistik. []

UNIMAL MENUJU PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN penuh kebanggaan, kita terus berpikir dan bertindak untuk kemajuan Universitas Malikussaleh (Unimal), baik pada level lokal, nasional maupun internasional. Membangun Unimal memerlukan dukungan semua pihak, baik para dosen, karyawan, orang tua mahasiswa, donatur, penyedia beasiswa dan keluarga pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe

Tahun 2013 lalu, usia Universitas berumur 12 Tahun. Dalam usia balita tersebut, kita memiliki komitmen ke depan untuk melahirkan alumnus yang berdaya saing unggul. Bukan hanya unggul dari segi kecerdasan, mampu menjawab soal, dan mampu selesai studi 4 tahun bagi S1. Ke depan alumnus Unimal harus unggul dalam kejujuran, disiplin, kerja keras dan ber-etika. Ini yang kita sebut dengan pendidikan Unimal berbasis karakter. Setiap lulusan harus berlandaskan moral. Gagasan ini penting untuk menghindari lahirnya lulusan Unimal yang bermental seperti mesin dan robot.

Setidaknya, ada empat basis dalam membangun pendidikan karakter. *Pertama*, basis agama. *Kedua*, basis kenegaraan (berlandaskan Pancasila). *Ketiga*, basis budaya ke-Acehan, dan *Keempat*, basis pendidikan.

Keempat basis tersebut merupakan modal dasar yang harus ada dalam hati sanubari setiap alumnus Unimal. Kenapa saya sebutkan itu modal dasar? Karena kita sedang berada pada titik krisis. Kita tidak lagi saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain.

Bangsa Indonesia dan Aceh khususnya sedang berada dalam krisis. Bukan sekadar krisis karena korupsi, asusila dan ketidakadilan. Tapi kita sedang mengalami krisis sumber daya manusia yang bermoral. Ke depan Indonesia butuh sumber daya manusia yang berkarakter.

Bung Karno mengatakan, bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*). Pilar utama dalam pembangunan yang berkarakter adalah pendidikan. Semua kita memaklumi bahwa pendidikan berperan besar dalam meningkatkan kualitas manusia, terutama untuk membangun masa depan yang lebih gemilang.

Untuk itu, kita perlu belajar dari kesuksesan pemimpin top dunia, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, pengusaha, maupun tokoh-tokoh spiritual. Bukti menunjukkan bahwa, karakter berbasis spiritual adalah landasan utama kehidupan untuk sukses memajukan diri sendiri dan lembaganya.

Hati dengan karakter yang baik seharusnya mengendalikan kehidupan. Bukan sebaliknya, kehidupan atau nafsu yang mengendalikan kita. Mata dapat melihat, tetapi tidak bisa mendengar dan berbicara. Telinga dapat mendengar, tapi tidak bisa melihat. Tetapi hati dengan berbasis pada karakter yang kita miliki, ia dapat melihat, mendengar dan berbicara.

Saya berharap, sebagai sarjana lulusan Unimal harus mampu meningkatkan kualitas pola pikir ketika berada di luar kampus nanti. Pola pikir adalah kualitas *mindset* ilmiah sebagai pengaruh pendidikan untuk memahami, dan memecahkan masalah yang akan dihadapi nanti.

Pola pikir bisa dalam bentuk ilmiah praktis, ilmiah teoritis dan ilmiah esensial. Sedangkan kecerdasan adalah, kemampuan diri secara pribadi dan psikologis menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kecerdasan ini, bisa dalam bentuk cerdas intelektual (IQ), cerdas emosional (EQ), dan cerdas spiritual (SQ).

Itulah esensi dari sebuah proses pendidikan di Universitas Malikussaleh. Dimensi karakter menjadi titik sentral ke depan, dalam melahirkan tenaga-tenaga yang profesional dan berkompeten di bidangnya.

Kepada setiap wisudawan, kita berpesan kemana pun Anda boleh pergi, tapi jangan pernah meninggalkan kami sendiri disini. Universitas Malikussaleh adalah almamater Anda, dan almamater kita semua.

Kritisi kami dengan karakter dan budaya yang kita miliki. Institusi ini sedang kita bangun, dengan pembangunan yang berbasis karakter. Hal ini

kita perlukan untuk menghasilkan Rektor dan dosen yang baik dan berkarakter.

Tentu, Universitas Malikussaleh berupaya untuk, menghasilkan mahasiswa yang berkarakter. Karena itu, jadilah Magister Manajemen yang berkarakter, teknisi yang berkarakter, ahli hukum yang berkarakter, ekonom yang berkarakter, ahli pertanian yang berkarakter dan ahli politik berkarakter. []

DESAIN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

FEBRUARI 2013 silam, saya diwawancarai oleh beberapa media di Lhokseumawe tentang isu pendidikan Aceh. Dalam wawancara tersebut, saya menawarkan bahwa Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, memiliki peluang untuk mendesain prioritas pembangunan pendidikan Aceh sebagai salah satu potensi perekonomian Aceh ke depan.

Kemudian Haji Sjamsul Kahar (Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia, *ed*), saat menyampaikan kuliah umum bertemakan "*Tantangan dan Peluang Praktik Jurnalisme Modern berbasis Tripple M (Multimedia, Multichannel dan Multiplatform)*" di Gedung Akademic Center Cunda (ACC) Unimal Cunda, Lhokseumawe, Sabtu (9/3). Pemimpin koran terbesar di Aceh tersebut mengatakan bahwa Universitas Malikussaleh (Unimal) berperan penting dalam membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe yang mulai menurun setelah migas berakhir.

Bahkan, Sjamsul mengatakan Unimal bisa membangun Lhokseumawe dan Aceh Utara lebih baik lagi dari nilai investasi LNG Arun. Menurutnya, Unimal bisa membangun ekonomi masyarakat Aceh Utara yang fundamental dengan lulusan terdidik dan terampil yang dimilikinya.

Tawaran ini bukan *cet langet*, melainkan kita sudah teruji secara sejarah. Bagaimana kawasan Darusalam Banda Aceh, yang dulunya kawasan tertinggal sekarang menjadi kawasan transaksi jasa dan salah satu pusat ekonomi di Banda Aceh. Dalam hal ini, saya menawarkan kepada Pemerintah Aceh dan Parlemen Aceh, harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap sektor pendidikan. Hal ini penting jika kita ingin menjadikan Aceh sebagai kota pendidikan yang berdampak bagi sektor ekonomi.

Pemerintahan Aceh di bawah Zaini Abdullah-Muzakir Manaf harus benar-benar serius memformulasikan sistem pendidikan Aceh yang berdampak bagi perekonomian Aceh jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah Aceh harus berani melakukan investasi dalam sektor pendidikan. Salah satu caranya adalah melalui keberpihakan anggaran untuk sektor pendidikan. Anggaran untuk dunia pendidikan perlu diperbesar lagi bukan justru diperkecil.

Membangun pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak bagi pembangunan ekonomi tidak cocok lagi dengan slogan-slogan, tapi melalui karya nyata yang perlu ditunjukkan. Sudah saatnya, pendidikan menjadi *leading sector* dalam pembangunan Aceh di bawah Zaini-Muzakir. Saat ini, hampir setiap negara telah menjadikan pendidikan sebagai bagian terpenting dalam melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan nasionalnya.

Ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian jika kita benar-benar ingin melakukan penguatan terhadap pembangunan pendidikan di Aceh. *Pertama*, manajemen dalam perspektif organisasi, sumber daya guru/dosen. *Kedua*, substansi yang operasional seperti implementasi kurikulum yang *sustainable* serta sesuai dengan kebutuhan zaman.

Karenanya, manajemen harus dimulai dari perencanaan, organisasi sampai dengan kebijakan pendidikan yang holistik untuk dapat membawa manfaat bagi seluruh warga Aceh. Sedangkan dari sisi kurikulum, harus benar-benar dirancang untuk pembangunan Aceh jangka panjang. Karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berjalan dalam jalur yang sesuai dengan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Selain itu, kurikulum pendidikan harus mengikuti perkembangan dunia modern.

Bila manajemen pendidikan tidak diperkuat, kita takutkan akan muncul permasalahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kualitas pendidikan Aceh. Dengan tidak optimalnya pendayagunaan anggaran dan sumber daya guru/dosen bagi penguatan pendidikan Aceh, maka peringkat buruk dalam skala nasional selalu menghantui pendidikan kita.

Ke depan, Pemerintah Aceh perlu memikirkan untuk mendesain pembangunan pendidikan yang berkualitas dan juga berdampak bagi pembangunan ekonomi masyarakat Aceh.

Kota Pelajar Baru

Dilihat secara geografis dan demografis, kawasan Aceh Utara-Lhokseumawe memiliki nilai tawar berbasis ekonomi dalam pembangunan pendidikan Aceh jangka panjang. Kita punya pengalaman panjang mengenai hal ini. Aceh, misalnya, telah sukses menjadikan kawasan Darussalam menjadi kawasan transaksi ekonomi dan jasa, selain sebagai kota pelajar. Dari kampus Darussalam kemudian lahir banyak sumber daya manusia yang terserap menjadi tenaga-tenaga yang terampil di berbagai instansi dan lembaga.

Kita optimis Pemerintah Aceh di bawah Zaini-Muzakir mampu membuat terobosan spektakuler dengan menciptakan kawasan Lhokseumawe sebagai kota pelajar baru, setelah Darussalam di Banda Aceh. Jika ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka tidak mustahil ke depannya *branding* Lhokseumawe yang puluhan takut melekat sebagai *petro dollar* berubah menjadi kota pelajar.

Selama ini, Lhokseumawe dan Aceh Utara dikenal dengan kota industri. Namun *branding* kota industri segera hilang, karena bahan bakunya sudah mulai habis. Penduduk Aceh Utara yang dulunya dikenal sebagai daerah pertanian berubah menjadi daerah industri. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dikuras dengan teknologi canggih, membuat nama Lhokseumawe dikenal di seantero dunia sebagai penyumbang gas alam yang besar. Di Indonesia, Aceh menjelma sebagai daerah penyumbang energi bagi keberlangsungan hidup masyarakat di negeri ini.

Anehnya, kesempatan emas tersebut kurang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam waktu jangka panjang. Hal ini terlihat dengan tidak adanya *blue print* yang jelas untuk Aceh pascahabisnya Gas Alam dan minyak. Padahal semua orang tahu gas minyak bumi pasti akan habis dan lama sekali baru dapat diperbaharui. Kita melihat, belum muncul pemikiran tentang tindakan alternatif mengantisipasi ketika sumber daya alam habis.

Langkah ini belum terlambat, seandainya Pemerintah Aceh memiliki keinginan untuk menjadikan pendidikan sebagai *leading sector* dengan cara mendesain Lhokseumawe dari Kota industri menjadi Kota jasa di bidang pendidikan atau disebut sebagai Kota Pelajar. Keberadaan Lhokseumawe yang dulunya yang dikenal sebagai pusat kerajaan Pasee memiliki keuntungan dari segi geografis dan letaknya di kawasan pesisir

Aceh. Ini tentu saja menguntungkan, karena secara demografi jumlah penduduk Aceh sebagian besarnya mendiami kawasan pesisir.

Tantangannya, saat ini, kita terlalu sibuk melihat prospek pembangunan ekonomi secara temporer, namun kita lupa bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang bagi Aceh. Di beberapa negara, sektor jasa bidang pendidikan mulai menjadi sumber pendapatan negaranya.

Kita di Aceh berharap semoga Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf memiliki kepedulian untuk menjadikan pendidikan sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi masyarakat Aceh. Salah satu strateginya adalah dengan mendukung finansial untuk ekspansi kampus-kampus di Aceh. Semoga ke depan, kawasan Pasee dipenuhi dengan para cendikia yang senantiasa dinantikan karya-karyanya untuk mensejahterakan masyarakat Aceh. []

UTU DAN PEMBANGUNAN BARAT-SELATAN

PERHATIAN pemerintah terhadap pembangunan pertanian masih dirasakan sangat minim. Apalagi bicara soal keberpihakan sungguh kita belum melihat energi besar dari pemerintah ini untuk mendorong sektor pertanian menjadi penghela pertumbuhan ekonomi di Aceh. Padahal sektor ini sangat menjanjikan dan menyimpan potensi besar untuk kemakmuran Aceh di masa akan datang. Maka pantai Barat-Selatan Aceh yang memiliki potensi yang amat sangat besar di sektor ini akan menjadi tempat bangkitnya ekonomi Aceh. Barat Selatan adalah masa depan Aceh yang dinantikan.

Ketika PT Arun NGL akan mengakhiri kegiatannya pada 2014 mendatang dan kemudian pabrik ini menjadi terminal regasifikasi yang berkapasitas 405 MMSCFD (*million metric standard cubic for day*) ini tentu akan membuat perubahan dalam rencana strategis pemerintah Aceh ke depan. Maka konsep Zona Pertanian dan Zona Industri yang pernah digagas oleh Gubernur Ibrahim Hasan pada era 1980-an lalu, mestinya bisa kembali dimunculkan sehingga Aceh memiliki kekuatan ekonomi baru.

Pembangunan tidak akan pernah lepas dari keberadaan manusia terampil dan memiliki keahlian serta kemampuan. Adanya *human capital* merupakan salah satu syarat dari keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas hanya mampu dihasilkan melalui lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi (PT) yang menjadi tempat *transfer of knowledge* dalam kehidupan. Universitas Teuku Umar (UTU) adalah satu institusi yang menjadi bagian penting dalam melahirkan SDM berkualitas di pantai Barat Selatan ini.

Keberadaan UTU

Kehadiran UTU yang diawali dengan Sekolah Pembangunan Pertanian pada 1984 adalah bukti bahwa perguruan tinggi ini memiliki keahlian

utama dalam upaya memperkuat dan mengembangkan sektor pertanian sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Universitas ini mengambil nama tokoh, pejuang sekaligus pahlawan yang sangat berani serta memiliki kemampuan dalam manajemen strategi yang begitu hebat. Maka keberadaan universitas ini harus mampu memberikan warna dan kontribusi penting bagi pembangunan Aceh utamanya di kawasan Barat Selatan ini.

Kehadiran UTU sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi sangat strategis dalam rangka mewujudkan segi tiga kekuatan pendidikan yaitu UTU, Unimal (Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe, *ed*) dan Unsam (Universitas Samudera-Langsa, *ed*) dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk Aceh yang lebih baik. Hadirnya UTU tentu memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan dalam masyarakat terutama dalam rangka membangun dan mendorong terciptanya masyarakat pembelajar.

Hal ini sangat penting karena berkaitan erat dalam upaya transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa memungkirkan bahwa masih saja perguruan tinggi laksana menara gading, di mana masih terdapat jurang yang dalam antara idealita dengan realita. Namun semua itu bisa diatasi dengan langkah-langkah progresif dan kemauan untuk membangun keberpihakan melalui kegiatan yang sistematis dan memiliki implikasi luas kepada masyarakat seperti program-program kemitraan dan membentuk *pilot project* yang berbasis pada sumber daya lokal.

Perguruan tinggi tidak saja memiliki kegiatan belajar mengajar yang reguler konvensional, tapi juga harus memiliki peta jalan (*road map*) bagi pengembangan masyarakat yang lebih operasional, yang mampu merespons persoalan mendasar dari masyarakat di mana kita hadir dan berada. Maka tidak ada kata lain kecuali perguruan tinggi membangun kemitraan strategis baik dengan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Inilah yang akan mengantarkan UTU sebagai pusat keunggulan di zona pertanian yang merupakan Aceh masa depan ini. UTU harus memainkan peran penting dalam proses pembangunan kawasan Barat Selatan Aceh. Di sinilah letak arti pentingnya keberadaan UTU sebagai katalisator pembangunan di kawasan ini.

Persaingan di masa akan datang tidak lagi pada tataran sumber daya alam, tapi lebih kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi lagi di tengah kondisi yang disebut sebagai era turbulensi ekonomi, hanya

perguruan tinggi yang mampu melakukan terobosan-terobosan yang pada gilirannya diaplikasikan oleh semua *stakeholder* untuk keluar dari era yang penuh guncangan ini. Seperti dikemukakan Robert B Tucker (2001), di abad ke-21 ini terdapat tantangan yang meliputi kecepatan (*speed*), kenyamanan (*convinience*), gelombang generasi (*age wave*), pilihan (*choice*), ragam gaya hidup (*life style*), kompetisi harga (*discounting*), penambahan nilai (*value added*), pelayanan pelanggan (*customer service*), teknologi sebagai andalan (*techno age*), dan jaminan mutu (*quality control*).

UTU sebagai institusi yang memiliki perangkat organisasi dan sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain, maka harus mampu menjembatani masyarakat dengan tantangan tersebut dengan cara membangun daya saing daerah, sehingga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain di Aceh bahkan di Indonesia. Harus dipahami bahwa pembangunan sektor pertanian tidak melulu soal pangan dan produk pertanian lain yang hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan akan makanan bagi manusia. Tapi bagaimana pembangunan pertanian yang menciptakan nilai tambah terhadap sumber daya hayati yang juga untuk pemenuhan kebutuhan industri serta energi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Kuznets (1964) dan Todaro (2000), sektor pertanian berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sebagai penyerap tenaga kerja, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan, penyediaan pangan dan bahan baku, serta berkontribusi dalam bentuk kapital dan sebagai sumber devisa. Poin terakhir ini tentu sangat menarik untuk dicermati, bagaimana upaya untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka peran serta UTU sangat dinanti. UTU harus mampu menawarkan program-program revitalisasi pertanian yang ditopang oleh keberadaan industri seperti hadirnya agropolitan di kawasan ini.

Hal tersebut akan terwujud bila UTU dapat membangun sinergisitas dengan pemerintah kabupaten utamanya SKPD yang memiliki tupoksi yang relevan dengan pengembangan sektor pertanian. Di samping itu secara internal kurikulum yang ditawarkan juga harus mampu menjawab tantangan di sektor pertanian, tentu tidak hanya untuk fakultas pertanian namun juga pada fakultas ekonomi yang diarahkan bagaimana untuk melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan wirausaha disektor pertanian dan berbasis di pedesaan.

Kawasan ini memiliki agroekosistem yang beragam tinggal lagi bagaimana hal tersebut kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih operasional dan implementasinya sesuai maka harus berdasarkan pada *community based* dan *resource based*. Di era ini semua daerah dituntut untuk mampu menggali potensi daerah secara optimum dan pada gilirannya dapat digunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jangan sampai kehadiran UTU justru memiliki andil dalam involusi pertanian karena mandegnya riset yang menyangkut dengan sektor ini.

Sektor pertanian

Begitu besarnya peranan sektor pertanian di masa akan datang sehingga seorang penulis terkenal mengenai investasi memiliki keyakinan bahwa sektor pertanian akan meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade ke depan dan lebih cepat dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Selama beberapa tahun terakhir ini dikarenakan kenaikan bisnis biofuel telah membuat bisnis pertanian tumbuh sangat meyakinkan.

Stephen Gandel menulis bahwa di Amerika Serikat saat ini mulai timbul kesadaran bahwa menjadi petani yang kini banyak digandrungi warga Amerika, adalah pekerjaan paling bagus pada abad ke-21 (Majalah Time edisi 11/Julai 2011). Maka berdasarkan hal di atas jelas sekali bahwa UTU memiliki peran dan kontribusi besar dalam upaya penguatan masyarakat dan pemerintahan di kawasan Barat-Selatan Aceh. Hal ini semakin dimungkinkan karena telah bergesernya paradigma dan pola pembangunan dari awalnya yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.

UTU memiliki peluang besar untuk maju dan berkembang serta memiliki posisi tawar yang tinggi dalam mendesain dan membangun peta jalan bagi Barat Selatan yang lebih maju dan berkembang di masa akan datang. Keberadaan UTU yang sangat strategis harus dioptimalkan dalam rangka mengembangkan dan potensi daerah yang akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yaitu sektor pertanian sektor yang akan memberikan dampak luas terhadap masa depan dunia.

JABAL GHAFUR LOKOMOTIF PEMBANGUNAN PIDIE

DI depan para anggota senat pada bulan Februari 2014, dalam kuliah umum yang saya berikan di Universitas Jabal Ghafur, Pidie, saya mengatakan bahwa membangun sebuah daerah harus berbasis ilmu pengetahuan. Membangun Pidie juga demikian. Keberadaan Universitas Jabal Ghafur tak bisa lepas dari cita-cita mulia untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan produktivitas bagi kemajuan daerah Pidie. Melalui proses pendidikanlah, salah satu strategi yang berkelanjutan, dalam membangun Kabupaten Pidie yang mandiri, dan merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan. Tentu lokomotifnya adalah Universitas Jabal Ghafur

Akhir tahun 2013 lalu, eksistensi Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum mengalami degradasi prestasi skala regional dan internasional. Menurut catatan *The Times Higher Education*, Pendidikan Tinggi (PT) kita tidak ada satu pun yang termasuk dalam 100 universitas terbaik di Asia. Sedangkan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Thailand ikut menyumbang beberapa universitas mereka dalam rangking 100 terbaik se-Asia.

Saya mencatat, ada beberapa masalah fundamental yang kita hadapi dalam meningkatkan sistem mutu pendidikan tinggi di Indonesia. *Pertama*, manajemen sistem pendidikan Indonesia yang tidak berbasis pada tindak lanjut (*sustainable*) yang sistemik. Setiap periode Presiden selalu muncul sistem peningkatan mutu baru. *Kedua*, belum ada *roadmap* baku tentang skema otonomisasi pengelolaan pendidikan tinggi, antar provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. *Ketiga*, sistem birokrasi pendidikan yang rumit pada perencanaan, proses dan dampak dari sebuah perguruan tinggi. *Keempat*, standar pendidikan nasional belum optimal dijalankan sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berlaku. *Kelima*, sudah seharusnya proses pendidikan harus berbasis pada kearifan lokal atau budaya lokal.

Domain tata kelola atau manajemen pendidikan tinggi, menjadi salah satu indikator dalam memajukan pendidikan Indonesia. Khusus untuk Aceh, diperlukan manajemen yang berbasis integrasi untuk memajukan pendidikan Aceh. Pemerintah Aceh, di bawah kepemimpinan dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas agama, melainkan juga teknologi, kecakapan bahasa dan multi disiplin keilmuan lainnya untuk menghindari Aceh dari *lost generation*. Namun demikian, kita harus optimis, bahwa pendidikan kita terus berjalan pada jalur untuk meraih kejayaan. Saya percaya, Indonesia butuh waktu yang tidak lama untuk bisa bersaing di Asia atau Global.

UJG Sebagai Lokomotif

Eksistensi kehadiran Perguruan Tinggi harus membawa kemaslahatan bagi pemerintah dan masyarakatnya. Universitas Jabal Ghafur sebagai salah satu Universitas tertua di Aceh harus mampu menjadi agen perubahan bagi pembangun Aceh. Universitas Jabal Ghafur di Aceh bukanlah pemain kemarin sore. Universitas Jabal Ghafur harus berperan aktif mencerdaskan generasi masyarakat Pidie dan sekitarnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melahirkan tenaga-tenaga terdidik yang siap memberi kontribusi bagi pengembangan masyarakat.

Untuk menjawab semua tantangan itu, Universitas Jabal Ghafur harus memperkuat dirinya dalam bidang penataan sumber daya dosen, karyawan, dan manajemen yang modern dengan berbasis teknologi informasi. Ini diperlukan untuk memperkuat peran pada sektor pembangunan internal dan eksternal kampus, serta dalam pencatutan dunia pasar bebas.

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses pengetahuan, ketrampilan, dan harus dilakukan secara terus menerus. Sedikit saja kita lalai menyiapkan pengembangan kualitas tenaga pengajar dan karyawan, lambat laun akan menjadi persoalan krusial yang harus dihadapi oleh suatu lembaga.

Banyak cendekiawan lokal dan nasional berasal dari Pidie. Dalam sejarah Aceh kontemporer, daerah Pidie banyak melahirkan tokoh politik, ekonomi dan sosial budaya yang berasal dari Pidie. Kami optimis, bahwa eksistensi dan kontribusi Jabal Ghafur tidak bisa lepas dari kemajuan Pidie khususnya, dan Aceh pada umumnya. Ke depan, seiring keterbukaan

informasi dan perdagangan pasar bebas. Universitas Jabar Ghafur setidaknya harus berperan aktif dalam 4 hal pokok.

Pertama, sektor pengembangan ekonomi rakyat. Setiap fakultas yang ada di sini harus didesain dalam pengembangan ekonomi rakyat. Strategi sederhana dengan melahirkan riset-riset dari dosen yang memiliki perubahan bagi ekonomi rakyat. Bagi mahasiswa dan alumnusnya juga demikian, harus mampu memiliki spirit *enterpreunership* (kewirausahaan). *Kedua*, sektor studi konflik dan perdamaian. Kita akui atau tidak, belajar dari sejarah Aceh, di mana Pidie banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh dalam konflik dan perdamaian. Dalam tataran konflik kontemporer, Aceh tidak bisa lepas dari ketokohan Abu Daud Beureueh dan Dr. Hasan Tiro. Ini adalah potensi, bukan ancaman. Untuk itu, tidak mustahil Universitas Jabal Ghafur harus berperan aktif dalam aspek studi konflik dan perdamaian. Banyak universitas di Malaysia, Thailand, Finlandia, Amerika Serikat, Australia dan Swedia menjadikan provinsi Aceh sebagai laboratorium studi konflik dan perdamaian. Saya pikir ini peluang yang harus direspon oleh Universitas Jabar Ghafur.

Ketiga, pembangunan berbasis kemitraan wilayah pesisir Aceh. Universitas Jabar Ghafur sebagai universitas yang berpengalaman sudah seharusnya mengambil peran dalam join bersama untuk membangun kemitraan antar universitas dan pemerintah dalam membuat blue print pembangunan pesisir Aceh. Wilayah Aceh pesisir memiliki potensi kelautan dan perdagangan. Potensi ini, harus dilakukan dengan komprehensif dengan kesepakatan peta jalan (*roadmap*) bersama.

Keempat, penguatan modal sosial masyarakat (*social capital*). Kehidupan sosial pascatsunami dan konflik di Aceh, pidie khususnya sudah mengkhawatirkan. Kehidupan sosial masyarakat saat ini bisa dikatakan sedang mengalami sejumlah permasalahan sosial, mulai dari degradasi moral siswa, sampai runtuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan toleransi antar orang dewasa.

Sebelumnya, dalam banyak literatur sejarah Aceh disebutkan bahwa Aceh memiliki ciri khas dengan modal sosial yang hebat dalam bidang adat istiadat, pendidikan dan agama. Karena modal sosial yang hebat itu pula, Aceh selalu berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Indonesia "memayungi" modal sosial Aceh itu dengan sejumlah perundangan.

Merespon hal itu, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Universitas Jabar Ghafur dan universitas lainnya di Aceh. *Pertama*, adanya gerakan penanaman nilai-nilai etika dan moral dalam bentuk yang strategis pada semua jenjang studi pendidikan. *Kedua*, diperlukan gerakan revitalisasi modal sosial yang mulai runtuh pascatsunami dan konflik secara proaktif.

Rasa solidaritas sesama warga, rasa empati dan rasa kepedulian sesama kita harus kita pupuk ulang. Rasa keangkuhan dengan basis kekayaan ekonomi harus kita geser pelan-pelan. Kita hidup di Aceh, kita akan dihormati, disegani dan dimuliakan bila kita memiliki ilmu pengetahuan dengan basis rendah diri dan tidak sombong dengan ilmu yang kita peroleh.

Kemitraan antara Universitas Malikussaleh dengan Jabar Ghafur, bukan saja penting bagi pengembangan keilmuan. Tapi juga menjadi perekat kolektif untuk merawat setiap pemikiran bagi kelangsungan hidup yang lebih bermartabat di Aceh. Apalagi kita sebagai insan kampus, bebas nilai untuk berpikir merdeka dan berpendapat.

Menutup tulisan ini, saya teringat satu bait puisi dari pendiri Universitas Jabar Ghafur, almarhum bapak Nurdin AR. *Untuk apa saling beda // tiada makna di mata-Nya // kita semua menuju masa // tiada beda antara sesama // semua dicipta sama // kita saja pembuat beda//*- (Sigli, 15 Juli 1986).[]

PEMBANGUNAN BERBASIS KEILMUAN

KONSEP pembangunan yang disusun dan dilaksanakan pemerintah baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selama ini berawal dari rencana musyawarah pembangunan (Musrembang) yang digelar sebelum tahun anggaran berjalan. Konsep ini menyerap aspirasi dari masyarakat bawah ke atas atau *buttom up*. Menampung seluruh masukan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan di desa, kecamatan, kabupaten atau provinsi tertentu. Masing-masing daerah memilih kebutuhan yang berbeda. Sehingga, pemerintah memandang penting menyerap aspirasi dari bawah.

Konsep ideal itu berbanding terbalik dengan praktik yang terjadi selama ini. Pembangunan cenderung menyerap aspirasi atau program pejabat tinggi atau *top down*. Sehingga, apa yang diinginkan masyarakat tidak tertampung dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD). Jika pun ada, jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan.

Kondisi itu disebabkan tidak adanya rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang disusun secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Sehingga, pembangunan yang dilakukan selama ini tidak pernah berkelanjutan. Pergantian kepala daerah melalui ritual Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lima tahunan secara otomatis mengubah arah kebijakan. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing kepala daerah membawa visi dan misi sendiri, sehingga mengalunir program yang telah disusun atau telah dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya. Akibatnya, dampak program atau pembangunan tertentu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat.

Jika ingin berbicara jujur, seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Indonesia pasti pernah merasakan intervensi dari kepala daerah untuk memasukkan program tertentu yang dianggap kepala daerah itu penting. Meski program itu tidak masuk dalam Musrembang yang telah dilakukan secara berjenjang dari kecamatan,

kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat yang telah menguras energi dan biaya. Namun terpaksa dimasukkan dalam APBD karena sesuai keinginan kepala daerah. Belum lagi ditambah aspirasi atau program yang dimasukkan lewat pintu lembaga legislatif. Maka, lengkap sudah Musrembang hanya sekadar seremoni tanpa makna dan arti bagi rakyat negeri ini. Seharusnya program prioritas jangka menengah dan jangka panjang itu tak lekang ditelan waktu. Meski rezim berganti, program itu wajib dilaksanakan.

Kondisi itu membuat sebagian daerah di Indonesia, termasuk Aceh tidak mempunyai fokus pembangunan yang jelas. Apakah ingin fokus mengembangkan pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pertanian, potensi kelautan atau mengembangkan sektor perkebunan.

Idealnya, pemerintah membuat beberapa program prioritas yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Sebut saja misalnya, ingin mengembangkan ekspor dan impor. Sehingga, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya diarahkan untuk mendukung aktivitas ekspor-impor tersebut. Hingga saat ini, meski pun Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan Pelabuhan Krueng Geukuh sebagai salah satu pelabuhan impor barang tertentu namun belum didukung pengembangan sektor lainnya misalnya penguatan sektor pertanian secara masif di semua daerah. Sehingga, pelabuhan itu masih sepi aktivitas ekspor dan impor.

Contoh lainnya mengembangkan industri pariwisata Islami. Jika sektor ini dipilih sebagai fokus pengembangan, maka pemerintah akan mengerahkan seluruh pembenahan infrastruktur dan pendidikan diarahkan pada pengembangan pariwisata Islami. Pada akhirnya pendapatan asli daerah (PAD) di sektor ini meningkat dan bisa dibagikan untuk mendanai pembangunan lainnya. Propinsi Aceh sebagai yang memberlakukan syariat Islam, namun di provinsi ini belum masuk dalam destinasi wisata Islami di Indonesia.

Praktek perbankan yang terjadi di Aceh juga belum semuanya dilaksanakan dengan sitem syariah. Walaupun semua pihak sudah mengakui bahwa sistem syariah lebih tahan dalam menghadapi krisis moter seperti yang terjadi di tahun 1998. Bahkan hampir semua perbankan sudah menyiapkan perangkat lunaknya dengan teknologi berbasis syariah. Namun karena pemerindah Aceh belum mengintruksikan kepada seluruh perbankan yang ada di Aceh wajib menerapkan sistem

syariah, maka mereka tetap melaksanakan sistem konvensional disamping sistem syariah yang memang sudah siap untuk dijalankan. Alangkah indahnya seandainya di Aceh semua bank melakoni sistem syariah. Tentu masyarakatnya merasakan ketenteram dalam melaksanakan transaksi ekonomi.

Melihat kondisi itu, pemerintah perlu menggabungkan inovasi dan teknologi dalam pembangunan. Wacana pembangunan berbasis inovasi dan teknologi bukan hal baru di Indonesia. Telah dimulai sejak rencana pembangunan lima tahunan era 1980¹. Namun, kreatifitas birokrat yang mengusung konsep pembangunan bertumpu pada inovasi dan pembangunan "dibunuh" oleh kepentingan elit. Sehingga, tidak aneh, bangsa ini masih berfikir konvensional yaitu pembangunan mengacu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seperti penebangan hutan untuk kepentingan jangka pendek dan menimbulkan efek jangka panjang yang menelan *cost recovery* puluhan miliar. Ketika merasakan efek pembangunan tanpa basis keilmuan ini, pemerintah baru membuat program baru yang disebut revitalisasi lahan dan lain sebagainya. Ini yang disebut program *trial and error*.

Negara-negara Asia yang miskin sumber daya alam meletakkan keilmuan, inovasi dan teknologi sebagai fondasi pembangunan. Lihatlah saat Korea Selatan memilih fokus mengembangkan industri dengan basis metalurgi, kimia dan elektoteknik, maka pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta fasilitas riset dibidang itu. Selama 10 tahun negara yang kini menjadi "macan" Asia itu menyiapkan seluruh energi untuk mendukung pengembangn industri tersebut.

Pemanfaatan Hasil Riset

Kalangan akademisi wajib melakukan penelitian sebagai bagian melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Seluruh dosen di Indonesia setiap tahun melakukan berbagai riset dari isu ekonomi, sosial, budaya, birokrasi pemerintah, teknologi tepat guna sampai penelitian tentang perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Hasil riset ini bisa digunakan pemerintah sebagai pijakan untuk menyusun program pembangunan. Sehingga, program pembangunan tepat sasaran sesuai yang diharapkan.

¹ Bambang Kesowo, Pembangunan Berbasis Pengetahuan, Harian Kompas, 3 September 2012

Sudah sepatutnya, pemerintah melibatkan akademisi dalam menyusun dan mengevaluasi program pembangunan. Sehingga, kita tidak lagi mendengar cerita sumbang bahwa perusahaan daerah tertentu sepanjang hidupnya tak pernah menghasilkan laba. Padahal, esensi mendirikan perusahaan daerah adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Hasil itu bisa digunakan untuk mendanai program-program pembangunan. Selama ini, perusahaan daerah yang sehat dan menghasilkan laba di Aceh bisa dihitung dengan jari. Perusahaan itu cenderung mengalami nasib hidup segan mati tak mau. Mari menemukan "penyakit" yang dihadapi pemerintah lewat riset yang mendalam. Sehingga bisa ditemukan "obat" mujarab untuk menyembuhkan penyakit tersebut dan pada akhirnya cita-cita mensejahterakan rakyat sesuai slogan kampanye kapala daerah bisa terpenuhi. Bukan sekadar janji-janji dan tabur mimpi siang hari.

Pada akhirnya, mari semua pihak baik itu sivitas akademika, kalangan industri, pemerintah bekerjasama sesuai porsi masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.[]

MEMPERBAIKI TUNAMORAL

PENDIRI bangsa Soekarno-Hatta dan pejuang lainnya di zaman kemerdekaan akan bersedih melihat moral bangsa yang didirikannya. Bangsa yang dicita-citakan hidup rukun, adil, makmur dan menghormati perbedaan itu kini berubah menjadi bangsa yang dalam istilah Buya Syafii Maarif mengalami tunamoral.

Kekerasan mengatasnamakan agama hingga tawuran antar remaja dan pelajar terus terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur hingga praktik korupsi belum bisa dihentikan. Sedangkan para elit bangsa ini masih mempertontonkan politik sadis, rakus hingga terbelit lingkaran korupsi. Dengan tak mengesampingkan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memburu pengurus uang rakyat itu, ada kecenderungan korupsi semakin akut. Pelakornya bertambah, dari bupati hingga sang istri, dari politisi hingga ketua mahkamah konstitusi, dari jaksa, hakim hingga pengacara. Belum ada lembaga negara yang bebas dari praktik kotor itu.

Kondisi tunamoral semakin mengkhawatirkan melihat hasil penelitian Rahmad H (2010) yang menyatakan bahwa delapan dari 100 remaja usia sekolah telah mengkonsumsi narkoba. 32 persen remaja usia sekolah 14-18 tahun di tiga kota besar Indonesia terlibat hubungan seks di luar nikah, serta 67,9 persen pelajar SMA terlibat aksi kekerasan. Sebegitu parah kondisi tunamoral calon pemimpin bangsa ini. Kini, kondisinya tak lebih baik dibanding hasil penelitian itu.

Tak berhenti sampai di situ, tunamoral juga terjadi di kalangan politisi. Mereka kerap mengumbar janji dan alpa menepati. Sedangkan rakyat terus menanti hingga Pemilu datang lagi.

Tunamoral semakin lengkap ketika elit politik berhasil memecah belah tatanan sosial dalam ritual pesta demokrasi. Mengatasnamakan demokrasi mereka mempertontonkan banalitas politik, menghujat tim lawan dengan kalimat sadis. Dampaknya, budaya sopan santun dan rasa hormat antar warga telah sirna.

Padahal, idealnya politisi memberikan pendidikan politik untuk rakyat. Menyatakan perbedaan pilihan dalam sebuah negara demokrasi adalah satu keharusan dan wajib dihormati, tanpa perlu dimusuhi lebih-lebih dipukuli. Tak perlu adu jotos untuk memenangkan partai atau calon presiden yang diusung.

Bangsa ini membutuhkan contoh nyata dari elit yang berkuasa. Elit yang menganyomi, menyadari bahwa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, beragam agama. Sehingga bisa mengembalikan citra bangsa ini, yang dikenal karena keramahannya, tolong-menolong, bergotong-royong, dan menghormati perbedaan pendapat.

Melalui Pendidikan

Dunia pendidikan masih dipercaya sebagai tempat perbaikan moral. Meletakkan fondasi dasar nilai-nilai luhur, etika, moral dan ajaran agama untuk generasi masa depan. Sehingga, melahirkan pemimpin yang tangguh, memiliki sikap sebagai anak Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya, sesuai ajaran ketiga Trisakti Pancasila yang diajarkan Bung Karno. Menjalankan nilai-nilai luhur budayanya. Tanpa terjerat praktik susila, korup dan kejahatan lainnya.

Pertanyaan berikutnya, mampukah sistem pendidikan kita memperbaiki moral anak bangsa? Jawabannya bisa beragam. Sejatinya, tujuan sistem pendidikan di negara mana pun adalah menyiapkan manusia yang tangguh secara emosional, cerdas secara intelektual dan menanamkan nilai spiritualitas yang dipenuhi ajaran etika dan moral dalam jiwa mereka. Tujuan ideal itu telah disadari sejak 16 tahun terakhir. Sepanjang reformasi, semua orang mendesak lembaga pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi menyiapkan calon pemimpin handal demi masa depan bangsa ini.

Namun, harus disadari, pendidikan masih barang mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak awal tahun ini menyebutkan sebanyak 11,7 juta anak usia sekolah di Indonesia belum bisa baca tulis alias buta aksara. Baru-baru ini, Badan PBB untuk

pembangunan (UNDP) merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh dunia. Laporan untuk tahun 2013 itu menyebutkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia menyebabkan IPM Indonesia berada pada peringkat 108 dari 187 negara dunia, dibawah negara ASEAN lainnya yaitu Singapura peringkat 9, Brunei peringkat 30, Malaysia peringkat 62 dan Thailand berada di posisi 89.

Artinya, sektor pendidikan harus mendapat perhatian serius presiden terpilih Joko Widodo yang jika tak ada perubahan di Mahkamah Konstitusi akan dilantik Oktober mendatang. Bangsa ini harus menyiapkan sumber daya guru dan dosen yang memiliki kemampuan mendidik bukan hanya bidang keilmuan, namun juga menyisipkan nilai-nilai moral dalam setiap proses belajar-mengajar matakuliah yang diampunya. Pemerintah juga harus mendistribusikan guru dan dosen ke daerah terluar Indonesia. Sehingga, akses pendidikan semakin dekat dengan rakyat.

Di sisi lain, kampus bukan hanya lembaga yang memberikan gelar sarjana. Namun, kampus harus menjadi lembaga yang menyiapkan generasi masa depan, dengan etika, moral dan keahlian. Sehingga, bisa diterima pasar kerja serta jujur saat melaksanakan tugasnya.

Komitmen untuk memperbaiki tunamoral ini telah dicanangkan oleh Presiden Terpilih Joko Widodo lewat gagasan revolusi mental. Untuk itu, sudah sepatutnya gagasan itu segera direalisasikan. Kini, mari bersatu memperbaiki tunamoral anak bangsa. Memulainya dari lingkungan kampus, instansi pemerintah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.

Ingat, sejarawan cum politisi Inggris, Edward Gibbon menyatakan kemerosotan moral adalah penyebab hancurnya bangsa-bangsa di dunia. Semoga Indonesia tak mengalami kehancuran itu. []

BAB III

EKONOMI PERADABAN DALAM KEAGAMAAN

MAZHAB BOHONG DALAM MASYARAKAT

KEHIDUPAN sosial keagamaan dalam tatatan masyarakat Aceh mengalami perubahan besar pascatsunami dan konflik. Berbagai penyakit sosial terus bermunculan di daerah ini. Transformasi penyakit sosial terus meningkat. Pola kehidupan yang jujur dan santun mengalami transformasi kepada pola hidup kebohongan.

Tranformasi pola kehidupan yang jujur, santun dan saling menghormati dalam masyarakat Aceh mengalami degradasi. Pola-pola kehidupan yang baik, sudah mulai dikalahkan oleh kehidupan-kehidupan yang kurang baik. Seperti peningkatan aksi kriminalitas dan taklid buta dalam arus imajinasi politik praktis.

Pola kehidupan serba bohong tidak bisa lepas dari peran masyarakat. Baik masyarakat pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan politik. Transaksi sosial dalam semua sektor pekerjaan tentu melahirkan tata cara kehidupan sosial di mana masyarakat berada.

Politik menjadi salah satu indikator, sering terjadinya pembohongan publik. Hal ini tak terlepas dari janji-janji kampanye untuk memilih seseorang menduduki kursi legislatif maupun eksekutif. Sering sekali janji politik jarang ditepati. Karena sering terjadi, kebohongan dalam kehidupan berserikat dalam politik menjelma menjadi "mazhab bohong".

Mazhab bohong ini tidak hanya dimiliki oleh para politisi, tapi juga menjadi senjata bagi para simpatisan-simpatisan partai politik di seantero *gampong* di Aceh. Mazhab bohong menjadi senjata utama dalam setiap transaksi kampanye politik.

Kemudian mazhab bohong menjadi virus bersama (kolektif) untuk merasuki setiap jiwa orang di Aceh, baik pemuda maupun orang tua. Karena sudah menjadi mazhab, tentu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

Perkembangan mazhab bohong di Aceh diawali oleh imajinasi-imajinasi kebangsaan, keacehan dan kedaulatan. Seiring imajinasi kebangsaan, keacehan dan kedaulatan selesai dengan perjanjian damai. Maka mazhab bohong dialihkan kepada imajinasi kekuasaan.

Imajinasi kekuasaan dalam praktek mazhab bohongnya selalu berujung pada dua hal. Yaitu material dan eksistensi diri. Wujud dari material dan eksistensi dilakukan dengan imajinasi dagang. Imajinasi dagang adalah imajinasi yang mudah dimaterialkan dalam perilaku politik, untuk mencapai kekuasaan, kehidupan yang mewah dan populer di mata masyarakat. Sedangkan imajinasi identitas kebangsaan, keacehan dan kedaulatan selalu berujung pada pengorbanan jiwa dan berdarah-darah. Namun imajinasi itu sudah tidak laku dijual dalam hidupan masyarakat Aceh saat ini.

Dampak Mazhab Bohong

Bila imajinasi kekuasaan dibangun di atas fondasi kebohongan, ingkar janji dan saling menyalahkan sesama orang Aceh, dapat dipastikan bahwa hasilnya juga akan berada pada lingkaran kebohongan. Hal ini menjadi pelajaran bersama bagi semua elemen dan tokoh masyarakat di Aceh untuk meresponnya. Karena bila eksistensi mazhab bohong terus menjalar, dampak yang ditimbulkan pada masa depan juga akan besar bagi kehidupan di dunia dan akhirat.

Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa akan sampai suatu saat nanti, di mana yang benar dianggap sebagai sebuah kebohongan dan yang bohong dipercaya oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Masyarakat lebih senang memilih dan mengidolakan para pembohong dan pembuat kemungkaran. Orang-orang yang baik dan benar (tidak suka pamer) tidak disukai dan bahkan dimusuhi karena akan menghambat kemungkaran yang akan dibuat oleh setiap anggota masyarakat.

Dampak utama dari realitas kehidupan sosial yang mengalami transformasi seperti itu. Maka Allah sebagai penciptan langit dan bumi beserta isinya akan melakukan tiga hal terhadap umatnya.

Pertama, Allah akan mengangkat keberkatan-keberkataanNya. Apapun yang dilakukan oleh umat tersebut tidak mempunyai keberkatan. Akibatnya, semua yang dilakukan terasa bagaikan kehampaan dan tidak banyak memberikan manfaatnya.

Kedua, lahir pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin bukan lagi melindungi rakyat, tetapi lebih banyak pola tingkah pemimpin memeras dan menzalimi rakyatnya sendiri. Bahkan pemimpin tersebut dengan lantang mengatakan apabila tidak senang dengan kebijakannya yang zalim tersebut silakan mencari tempat lain. Padahal kalimat terbut yang berhak mengeluarkan adalah pencipta langit dan bumi ini beserta segala isinya. Bukan manusia yang lahirnya tidak mambawa apa-apa dan kembalinya juga tidak membawa apapun, kecuali hanya helaian kain kafan yang tidak terjahit.

Ketiga, yang dipercaya adalah pengkhianat. Para pengkhianat baik itu pengkhianat rumah tangga, pengkhianat bangsa pada saat tersebut akan dipercaya bagaikan seorang pahlawan. Sedangkan orang yang jujur dan punya integritas tidak akan dipercaya, bahkan didiskreditkan. Hal ini kemungkinan akan menghambat keinginan dan golongannya dalam memuluskan berbagai kemaksiatan serta memperkaya diri terhambat oleh orang yang jujur. Atau sering diistilahkan orang jujur adalah orang yang kaku, saklek dan tidak luwes dalam menghadapi perkembangan zaman.

Akhirnya karena kebohongan sudah menjadi suatu hal yang lumrah di tengah masyarakat Aceh. Maka dari itu, kita harus menjauhi virus mazhab bohong dalam masyarakat secara kolektif agar terhindar cobaan dunia kepada masyarakat kita. Karena mazhab bohong ini, mulai kembali berimajinasi dalam bentuk "*lumpoe-lumpoe*" (mimpi, *ed*) yang tak pernah sesuai dengan janji-janji sebelumnya. Saya termasuk orang yang khawatir imajinasi-imajinasi yang dibalut dalam mazhab bohong secara sistematis dapat berujung pada potensi konflik horizontal dan sangat dibenci oleh Allah Swt. []

PUASA DAN ETOS KERJA

KEUTAMAAN puasa pada fase sepuluh awal ramadhan adalah rahmat. Artinya rahmat atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambaNya. Kita sebagai manusia harus pandai bersyukur dengan segala karunia kesehatan, kesejahteraan, dan kekuatan yang diberikan Allah, salah satunya adalah untuk meningkatkan etos kerja.

Tujuan puasa adalah agar kita bertaqwa. Pada ayat yang memerintahkan puasa disebut "*la 'allakum tattaqun*" (agar kamu bertaqwa). Kata taqwa tentu mencakup segala kebaikan yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan yang kita geluti sehari-hari sebagai bagian untuk mencapai ketaqwaan. Ada yang mengatakan puasa yang kita lakukan adalah jahitan pakaian ketaqwaan kita.

Dalam ibadah puasa, ada 3 (tiga) nilai pokok. *Pertama*, adanya sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial sekitar. *Kedua*, adanya keterkaitan antara kesalahan pribadi dan kesalahan sosial (kelompok). *Ketiga*, lahirnya jiwa keagamaan yang inovatif, kreatif, efisiensi dan produktif.

Dari ketiga nilai itulah tertanam sejumlah spirit puasa dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas kerja, salah satu caranya dimulai selama ramadhan. Bulan ramadhan menjadi ujian awal untuk menguji etos kerja seseorang. Jika etos kerja meningkat selama bulan ramadhan, maka sudah bisa dipastikan secara alamiah bahwa produktivitas kerjanya juga terus meningkat pada bulan-bulan setelah ramadhan.

Esensi aktivitas kehidupan manusia bermuara pada 2 unsur, yaitu unsur ibadah dan maksiat. Semua kita berada pada salah satu unsur tersebut pada setiap aktivitas kerja yang kita lakukan. Dengan catatan keberadaan kita pada salah satu unsur itu sangat tergantung pada niat melaksanakan setiap pekerjaan yang kita lakukan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa "Sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan." Jadi nilai suatu bentuk pekerjaan, bukan hanya dilihat dari kinerja produktivitas, melainkan juga harus dilihat secara holistik dan filosofis dalam niat kebaikan atau keburukan.

Pada bulan ramadhan semua ibadah akan dilipatgandakan pahalanya. Makanya karena nilai ibadahnya tinggi, sudah pasti setiap orang akan berlomba-lomba untuk beraktivitas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja yang baik. Bagi yang memahami bulan yang penuh rahmat ini tentu akan meningkatkan berbagai aktivitas (ibadah), dan tentu berusaha untuk mereduksi aktivitas-aktivitas yang memiliki unsur maksiat, supaya puasa yang dijalani diterima Allah Swt.

Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *Ihya Ulumuddin* mengatakan bahwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya, kita harus menyikapinya dengan dua maqam. Yaitu, *khauf* (khawatir) dan *raja'* (harap). Artinya kita harus menjadikan puasa benar-benar sebagai ibadah yang agung dan dapat membawa inspirasi bagi kita, keluarga dan umat secara keseluruhan. Sebagai upaya supaya puasa yang kita laksanakan diterima Allah Swt.

Puasa dan Etos Kerja

Puasa mengandung banyak spirit. Dari berbagai kajian disiplin ilmu, puasa bagi seseorang mengandung banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Di antara spirit yang tak kalah penting dari esensi puasa adalah meningkatnya etos kerja manusia dalam menjalani rutinitas pekerjaannya.

Setidaknya akan melahirkan 5 (lima) spirit puasa dalam etos kerja. *Pertama*, munculnya hubungan spiritual yang erat manusia terhadap Allah. Sehingga menjadikan manusia bersungguh-sungguh dalam peningkatan produktivitas kerja pada bulan ramadhan.

Kedua, spirit puasa menjadikan manusia menjaga hubungan yang

harmonis, selaras dan serasi dengan relasi kerjanya. Baik antara bawahan dengan atasan, maupun antar institusi. *Ketiga*, spirit puasa melahirkan manusia untuk menempuh cara-cara yang "halal" baik dalam menjalani sebuah pekerjaan, maupun dalam proses mencari pekerjaan.

Keempat, spirit melahirkan manusia pada level saling menghormati, toleransi dan menyanyangi antar makhluk sebagai pencipta dari Tuhan semesta. Dan *kelima*, spirit puasa meningkatnya profesionalisme dalam setiap pekerjaan yang diemban.

Jika setelah ramadhan etos kerja dan produktivitas menurun, disiplin kerja dilanggar, maka puasa seseorang itu tidak dilandasi pada makna filosofis, melainkan hanya bermain pada tataran historis atau ritual semata.[]

PUASA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER

ADA banyak esensi puasa dalam bulan Ramadan. Salah satunya puasa menjadi media pendidikan bagi umat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Setiap manusia dewasa, yang sudah diwajibkan berpuasa dan memegang teguh ajaran agamanya, sudah seharusnya ia menunjukkan kualitas beragama yang berdampak pada ketakwaan dirinya dan bermanfaat bagi kehidupan orang sekitarnya.

Tujuan puasa adalah agar kita bertakwa. Pada ayat yang memerintahkan puasa disebut "*la 'allakum tattaqun*" (agar kamu bertakwa). Kata takwa tentu mencakupi segala kebaikan yang kita lakukan. Belajar ilmu pengetahuan menjadi bagian untuk mencapai ketakwaan. Ada yang mengatakan bahwa puasa yang kita lakukan adalah jahitan pakaian ketakwaan.

Al Ghazali dalam karya *Ihya' Ulumuddin* menyebutkan ada 3 level orang dalam berpuasa untuk mencapai ketakwaan. *Pertama*, puasa orang awam (*shaum al-umum*). Seseorang yang melaksanakan puasa hanya bisa menahan lapar dan haus. Tetapi ia dekat dengan dosa dan mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah. Menurutnya, ada 5 hal yang menyebabkan seseorang batal atau hilang pahala puasanya; berdusta, janji yang palsu, melihat dengan syahwat, mengadu domba dan membicarakan kejelekan orang lain (*al ghaibah*).

Kedua, puasa orang khusus (*shaum al-khawas*). Yaitu bentuk puasa yang menahan dirinya dari makan, minum, seksual, dan menahan segala larangan Allah. *Ketiga*, puasa orang istimewa (*shaum al-khawas al-khawas*). Puasa level ini bukan saja menahan dari hal-hal pada level kedua, tetapi juga tidak memikirkan segala hal lain, selain Allah. Level

ketiga inilah, menurut al Ghazali bentuk puasa yang paling ideal dan sempurna dalam mendapatkan penghargaan ketakwaan.

Oleh karena itu, puasa harus kita lakukan untuk mendapatkan posisi ketakwaan di hadapan Allah. Ketakwaan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh keyakinan berlandaskan keilmuan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan kualitas kehidupan beragama. Salah satunya adalah dengan menjadikan puasa sebagai pendidikan karakter dalam implimentasi pendidikan kita ke depan.

Pendidikan Karakter

"Character Building (Pembangunan Karakter) saat ini sedang menjadi isu menarik dalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum maupaun agama. Pengembangan karakter peserta didik telah menjadi masalah bersama untuk mencari jalan keluar. Karena isu pendidikan karakter sedang menjadi isu nasional dan internasional. Puasa pada bulan Ramadhan, merupakan media yang ampuh untuk internalisasi nilai pendidikan karakter ke dalam diri anak-anak atau peserta didik di kalangan umat muslim.

Puasa bagian dari proses internalisasi nilai-nilai pendidikan dan kemanusiaan. Dalam berpuasa tentu membutuhkan ketekunan hati dalam melakukannya. Dari ketekunan itulah lahirnya kualitas puasa dan hidup yang humanis. Meningkatnya kualitas hidup bukan karena kita mampu menahan makan dan minum, melainkan juga kita wajib menahan hawa nafsu yang sudah melekat pada diri setiap manusia.

Puasa juga mengajarkan umatnya untuk bisa bersikap lebih kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika seseorang terlatih untuk bersikap kritis dan introspektif dari persoalan sosial yang timbul di masyarakat diharapkan akan muncul kekuatan dan keberanian moral untuk melakukan koreksi dan tindakan perbaikan bersama-sama. Karakter orang yan berpuasa seperti ini, tentu akan membawa dampak kepedulian sosial dalam membangun pendidikan yang berbasis karakter.

Di sisi lain, harus ada upaya nyata bagi dunia muslim di Aceh maupun dunia, untuk meningkatkan kualitas hidup umatnya melalui implimentasi pendidikan karakter. Puasa salah satu media sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena esensi pendidikan karakter, sepenuhnya menjadi bagian esensi puasa itu sendiri. Esensi pendidikan karakter terletak pada serangkain sikap (*attitudes*), perilaku (*behavior*), motivasi (*motivation*), dan ketrampilan (*skills*), yang bermuara pada

pembentukan karakter manusia yang mulia dan bermoral. Esensi pendidikan karakter untuk peserta didik semuanya ada dalam praktek berpuasa.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah/umat yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik dan bermoral.

Puasa sebagai pendidikan karakter, bisa dilihat juga dari 6 (enam) pilar yang bisa dilakukan aplikasi. *Pertama*, dipercaya. *Kedua*, jujur. *Ketiga*, saling menghormati. *Keempat*, peduli sesama. *Kelima*, bertanggung jawab, dan *Keenam* kewargaan secara sosial agama. Keenam pilar pendidikan karakter itu, akan mudah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan bila pemegang kekuasaan peduli terhadap kemerosotan moral peserta didik di Aceh maupun Indonesia.

Akhirnya, puasa sebagai media pendidikan karakter sudah sudah seharusnya dilakukan *by desain* untuk menciptakan siswa yang bermoral, jujur, peduli sesama dan saling menghormati. Selain itu, yang tak kalah penting adalah harus ada upaya yang *sustainable* menciptakan dosen atau guru yang berkarakter pula. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya, sehingga mampu memperoleh derajat ketawakaan di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya. "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kalian." (QS. Al Hujarat: 13).[]

PUASA, PRODUKTIVITAS DAN ETOS KERJA

RAMADHAN adalah bulan suci yang penuh inspirasi untuk mengubah pola hidup. Puasa yang kita jalani dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, akan tercermin suatu pola hidup yang matang secara spiritual dan kesehatan. Dampak dari pola hidup yang benar, akan melahirkan produktivitas kerja yang baik.

Tidak boleh menjadikan puasa, sebagai penghalang menurunkan produktivitas dan etos kerja. Karena Nabi Muhammad saw, pernah menyatakan agar kita berpuasa, karena puasa akan menyehatkan jiwa raga kita. Untuk itu, berpuasa sangat erat kaitannya dengan keikhlasan dan kesabaran untuk menjalaninya.

Sebagai satu perintah Allah swt terhadap umat Islam. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183).

Ketakwaan menjadi akhir yang harus diraih bagi orang muslim yang berpuasa. Sebagai sebuah kewajiban, puasa harus menjadi pendorong bagi aktivitas yang lebih baik. Melakukan ibadah puasa dengan benar dan baik, memiliki korelasi antara puasa yang benar dengan spirit kerja seseorang untuk meraih keberhasilan dalam tatanan kehidupan sosialnya.

Untuk mengawal eksistensi etos kerja yang baik, terutama dalam konteks Aceh, setidaknya bisa dilihat dalam empat tahapan. Pertama, adalah

penguatan etos kerja yang berbasis agama (Alquran dan hadis). Kedua, basis kenegaraan (Pancasila dan UUD 1945). Ketiga, basis budaya keacehan (adat istiadat dan budaya). Dan, keempat, basis pendidikan.

Keempat tahapan itu, menjadi modal dasar bagi manusia untuk mempertahankan etos kerja yang produktif. Kalau seseorang puasa dengan memiliki basis dasar, maka ia akan selalu menjaga determinasi kinerjanya. Puasa tidak menjadi halangan bagi setiap manusia, untuk berkontribusi dalam setiap pekerjaan yang digelutinya.

Belajar dari kesuksesan pemimpin top dunia, baik dalam bidang akademisi, pemerintahan, pengusaha, maupun tokoh-tokoh spiritual. Bukti menunjukkan bahwa, karakter berbasis spiritual adalah landasan utama kehidupan untuk sukses memajukan diri sendiri dan lembanganya.

Setiap manusia dengan karakter yang baik, seharusnya mengendalikan kehidupan. Bukan sebaliknya, kehidupan atau nafsu yang mengendalikan kita. Mata dapat melihat, tetapi tidak bisa mendengar dan berbicara, telinga dapat mendengar, tapi tidak bisa melihat. Tetapi dengan pendekatan hati, yang berbasis pada karakter, ia dapat melihat, mendengar dan berbicara seutuhnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Kejayaan sumber daya alam, semakin hari semakin menipis. Maka kedepan pembangunan kualitas manusia berbasis karakter spritual menjadi mutlak kita lakukan. Aceh harus memproduksi manusia yang berbasis spritualitas, supaya melahirkan masyarakat Aceh yang berdaya saing dengan etos dan disiplin kerja yang mumpuni. Masyarakat yang berdaya saing, akan menjadi modal penting dalam melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa.

Untuk mencapai kesuksesan dan etos kerja yang baik, diperlukan proses dan kerja keras. Mahatma Gandhi, pernah mengatakan: "Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil, usaha yang keras adalah kemenangan yang hakiki."

Begitu juga umat Islam dalam menjalani ibadah puasa. Kerja keras akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam waktu tertentu. Di balik itu semua, setiap proses yang menjadi sebuah kewajiban, harus ditunaikan. Supaya tidak berdosa dihadapan Allah.

Menjalani puasa dengan etos kerja yang tinggi, harus menjadi pola hidup bagi setiap muslim, karena 99% kesuksesan kita, tergantung pada kerja

keras. Hanya 1% kecerdasan berkontribusi terhadap kesuksesan seseorang dalam setiap aktivitas yang dilakukan setiap manusia.

Semua orang bisa sukses, dengan latar belakang ekonomi yang lemah, keterbatasan fisik, intelegensi yang kurang, hal demikian bukan faktor penghalang untuk meraih kesuksesan. Asal kita memiliki obsesi dan bekerja keras. Dengan semangat dan etos kerja yang tinggi, puasa harus kita jalani dengan penuh manfaat dan hasilnya akan didapatkan di dunia dan akhirat.

Puasa harus menjadi pemompa peningkatan etos kerja. Karena puasa selain mendapat ganjaran berlipat gandar dari Allah Swt, juga mendapat keberkahan kesehatan bagi setiap yang menjalankannya. Semoga, Ramadhan tahun ini dapat meningkatkan etos kerja dengan skema yang lebih humanis.[]

KEADILAN DALAM ISLAM

FILOSOFI keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (Agustianto, 2004). Al Quran dan hadist sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas. Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia. Selain sebagai sebuah kewajiban dan keharusan. Keadilan sosial dan ekonomi juga memiliki nilai transendental terhadap Allah (ibadah) sebagaimana firman Allah Swt: "Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur." QS. Al-A'raf: 10)

Ibadah dalam ajaran Islam bersumber kepada dua kutub. Kutub vertikal antara manusia dengan Allah, kutub horizontal antarsesama manusia. Jadi esensi ajaran Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi bisa berada pada kedua kutub ini. Namun dominasi berada pada interaksinya antarsesama manusia. Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya

yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami.

Setidaknya, ada prinsip utama keadilan dalam Islam, yakni: *Pertama*, tidak boleh ada saling mengeksploitasi sesama manusia, dan *Kedua*, tidak boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja (monopoli). Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukan-Nya.

Interaksi sosial

Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama.

Kehidupan bermasyarakat dalam Islam sebagai satu aspek untuk mencapai kebahagiaan, merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, Islam meletakkan dasar-dasar bagi manusia tentang tata cara hidup bermasyarakat dengan baik (Adnan, 2003:38). Islam membentuk suatu tatanan atas dasar pandangan hidup dan mengangkatnya sebagai modal dasar masyarakat sejahtera. Apabila masyarakat yang mempunyai cita-cita keadilan sosial ingin mendapatkan hasil nyata, maka mereka harus mengorganisasikan diri untuk berusaha mencapai cita-cita tersebut. Jadi, hanya dalam organisasi masyarakatlah diharapkan keadilan sosial itu dapat direalisasikan.

Falsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme (Agustianto, 2004). Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli atau apa pun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam adalah adanya aturan main (*rules of*

the game) tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipisahkan. Etika sebagai pondasi dalam membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persaudaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa saling melakukan eksploitasi.

Menurut Imam Ali, definisi tentang keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dapat dikatakan bahwa keadilan ekonomi adalah mengantarkan semua anggota masyarakat kepada hak-hak ekonomi mereka masing-masing. Pandangan Islam tentang sistem ekonomi itu berpijak pada tiga faktor: *Pertama*, faktor akidah yang berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya; *Kedua*, faktor moral yang menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (humanis) dan bertanggungjawab pada setiap perilakunya, dan *Ketiga*, faktor syariah yang berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas (M. Faruq an-Nabahan, 2000:3)

Dalam sistem ekonomi Islam, pengorganisasian aktivitas-aktivitas pribadi maupun kolektif yang bersifat ekonomis harus diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan umat. Di samping itu, aktivitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara untuk mencapai kesejahteraan umat manusia telah ditentukan oleh prinsip-prinsip dan kandungan-kandungan ajaran Islam. Islamlah yang telah memberikan nilai-nilai kepada keadilan sosial. Dengan kata lain, egalitarianisme ekonomi akan menjadi batu uji bagi keadilan sosialisme Islami (Adnan, 2003:53).

Syariat Islam

Secara legal formal, Aceh sebagai satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, hingga kini masih terus mencari format ideal dalam mengimplimentasikannya. Berbagai teori dan pemahaman tentang syariat Islam dikonsepsikan dalam rangka mencari pemantapan dan kesesuaian antara teks dan realitas penerapan syariat Islam, bagaimana yang seharusnya. Meskipun nantinya ditemukan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam penyesuaian penerapan antara teks dengan realitasnya. Namun di balik itu, ada esensi keadilan sosial dan ekonomi dalam implementasi syariat Islam (Syamsul Bahri, 2012:13).

Dalam perspektif Aceh kontemporer, syariat Islam bagian dari alat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Jadi tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menyalahkan syariat Islam sebagai penghambat dalam pencapaian keadilan sosial dan ekonomi. Satu hambatan ketercapaian keadilan sosial dan ekonomi dalam perspektif Aceh adalah berada pada tataran politik baik konseptual maupun praktis. Secara konseptual, seharusnya pemangku kepentingan harus memiliki roadmap yang jelas dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

Membangun Aceh yang lebih baik salah satunya harus melalui desain ekonomi yang benar-benar menguntungkan masyarakat kelas bawah. Tidak mudah untuk menyusun desain ekonomi Aceh yang mampu membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh pascatsunami dan konflik. Artinya, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh dan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat Aceh harus dengan basis ekonomi kerakyatan, yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan dan karakter Aceh (Apridar, 2013:2).

Dalam ajaran Islam kehidupan masyarakat harus merata. Orang kaya membantu yang miskin. Maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.

Firman Allah Swt: "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah." (Qs. An-Nahl: 71)

Jadi keadilan sosial dan ekonomi dalam perspektif keacehan dalam konteks implimentatif sangat tergantung pada *political will* pada pemangku kebijakan. Kalau pemangku kebijakan membangun berbasis pada kepentingan golongan, maka mustahil keadilan sosial dan ekonomi terwujud. Ini berarti, keadilan sosial dalam pembangunan di Aceh harus berbasis pemberdayaan sumber daya manusia seluruh masyarakat Aceh.

Dan, sebagai sebuah epilog dari tulisan mengenai ajaran Islam tentang keadilan terutama pada bidang sosial dan ekonomi setidaknya harus dapat membawa virus dalam mereduksi kemiskinan di Aceh.[]

ISLAM RAHMATAN LIL'ALAMIN

ISLAM adalah agama yang diturunkan Allah untuk menebar rasa rahmat (cinta kasih) bagi alam semesta. Spirit cinta kasih (rahmat) dalam Islam tersebar dalam banyak teks-teks seperti yang terkandung dalam al Quran dan Hadis. Dalam kontek sosial kehidupan hari ini, secara empiris ditemukan bahwa orang-orang mayoritas mengancam orang minoritas dalam berama. Begitu juga dalam umat beragama antar Islam. Antar penganut mazhab saling menebar kebencian, bukan menebarkan rahmat atau cinta kasih seperti esensi dari Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyaksikan secara empiris bahwa orang-orang yang beragama menjadi orang-orang kuat dan dengan bebas menebar kebencian bagi mazhab lainnya. Lebih ekstrem lagi banyak juga pemuka agama yang terjebak saling mengkafirkan, menyesatkan dan saling intimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa tatakelola kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya selesai.

Hidup ini harus berdampingan dengan semua elemen. Supaya bermakna bagi diri kita, *kawom* kita dan umat kita. Toleransi sesama muslim menjadi hal penting untuk saling ingat-mengingat. Toleransi antar muslim perlu diperkuat dan dipupuk supaya tidak menjadi alasan bagi orang non muslim untuk mengatakan bahwa Islam itu tidak toleransi antar sesama, apalagi antar umat beragama. Makanya toleransi itu harus kita pupuk dan kita perkuat. Sehingga dengan kemudian, toleransi antar agama dapat kita kampanyekan dan sosialisasikan sebagai esensi dari hidup multi entik dan agama di dunia ini.

Perbedaan Mazhab

Sesungguhnya hidup dalam konteks hari ini, tema toleransi hidup antar muslim masih relevan dan penting dilestarikan dan dikampanyekan. Intimidasi dan inkonsistensi dalam beragama sesama Islam itu harus dipahami sebagai sebuah ijtihad personal. Sentimentil sesama umat Islam karena perbedaan mazhab, harus direspon sebagai sebuah pilihan yang *rahmatan lil'alam*. Dan harus direspon pula sebagai kajian yang komprehensif supaya terhindar dari stigma Islam yang terkotak-kotak, Islam kiri, Islam kanan, Islam ekstrem, Islam radikal dan stigma-stigma lainnya.

Umat Islam dasar pijakannya berpedoman pada Al Quran dan Hadist. Maknanya umat Islam bebas untuk beribadah sesuai dengan mazhab yang dianutnya, asal mazhab itu bersandarkan pada Al Quran dan Hadist. Namun yang terjadi dalam penataan ibadah muslim hari ini, seolah-olah masyarakat didorong untuk menganut suatu mazhab, dengan meninggalkan dan menyalahkan mazhab yang lain. Padahal, perbedaan mazhab itulah, menjadi "kunci" dasar bagi terpecah belah umat Islam kontemporer di dunia maupun di Aceh.

Dalam konteks kajian ilmiah, semua mazhab harus dipelajari. Menyangkut dengan mazhab yang dianut seseorang itu kembali kepada orang-orang yang menyakini untuk memilihnya tanpa harus memarginalkan sesama umat Islam. Sebab, perbedaan mazhab yang semuanya bersandar pada Al Quran dan Hadist. Artinya seseorang tidak boleh mengkultuskan sebuah mazhab dalam menyelesaikan suatu perkara sunnah.

Dilihat lebih jauh, perpecahan umat muslim sebagai wujud dari penyebutan bahwa perselisihan membawa rahmat. Ini menjadi kunci bagi pihak non Muslim untuk terus menerus "mendesain" umat Islam untuk hidup dalam perpecahan. Karena perpecahan dianggap sebagai rahmat. Ini tentu akan terus membawa dampak ketidakharmonisan antar sesama muslim, baik di Aceh maupun di belahan dunia lain.

Secara pribadi, setidaknya saya memiliki 4 (empat) alasan sederhana, kenapa umat terutama antar mazhab dalam Islam terkotak-kotak dan saling klaim, malah ada yang saling kafir mengkafirkan.

Pertama, adanya "desainer" yang ingin terus menerus supaya umat Islam selalu hidup dalam "perang" antar mazhab. *Kedua*, egoisme dalam memandang sebuah kebenaran antar mazhab. Saling benci dan saling

bunuh menjadi *ending* dari perdebatan antar mazhab. *Ketiga*, selalu menonjolkan perbedaan dalam sunnah, dan *Keempat*, tidak ada kajian komprehensif dalam sebuah institusi Islam yang "berkarakter" untuk kemaslahatan umat Islam dan antar umat beragama.

Peringatan Al Quran

Dampak paling krusial dari perbedaan mazhab adalah berujung pada saling bunuh membunuh. Namun apa pun dalihnya, sesungguhnya haram mencaci dan membunuh sesama Muslim, kecuali betul-betul ada pengadilan di bawah kepemimpinan Islam yang membuktikan bahwa orang itu memang harus dihukum mati/dibunuh.

Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki atau perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (QS. Al Ahzab:58). Kemudian Bukhari dan Muslim dalam hadisnya menyebutkan bahwa "*Mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran*".

Makanya tidak ada peluang bagi penganut mazhab tertentu dalam Islam saling menebar kebencian dan saling membunuh. Peringatan Al Quran dan Hadist, sudah menjadi fakta di mana semua orang mengabaikan untuk kemudian saling tuduh sesama muslim, dan saling bunuh. Ini bukan hanya terjadi di manca negara, di negara kita dan daerah kita juga sering terjadi. Bahkan di Aceh, perbedaan partai politik saja berakhir pada label pengkhianatan dan pembunuhan. Apalagi perbedaan aliran dan mazhab. Semoga Islam benar-benar menjadi rahmatan lil'alamina bagi masyarakat Aceh semuanya !.[]

KEPUSTAKAAN

Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh
Harian Rakyat Aceh, Banda Aceh
Harian Kompas, Jakarta

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. Apridar, SE, M.Si, lahir di Lhokseumawe-Aceh Utara, pada tanggal 13 April 1967. Ia merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari ayahanda Abdurrahman Puteh (almarhum) dan ibunda Dawiyah Abdullah. Penulis tamat SD Negeri 2 Lhokseumawe pada tahun 1980, tamat SMP Negeri 3 Lhokseumawe tahun 1983, dan tamat SMA Negeri Lhokseumawe tahun 1986. Pada tahun 1993 penulis menamatkan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Darussalam-Banda Aceh. Kemudian pada tahun 1999 penulis menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Unsyiah Darussalam-Banda Aceh. Pada tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Darussalam- Banda Aceh.

Buku yang pernah diterbitkan adalah (1) Tsunami Aceh : Adzab atau Musibah, Penerbit Al Kausar, Jakarta, Cetakan I Februari 2005 Cetakan II Mei 2005. (2) Ekonomi Moneter, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe, April 2008 (3) Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah, Penerbit Universitas Malikussaleh Press, Lhokseumawe, Desember 2008. (4) Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan Dalam Aplikasinya, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Agustus 2009. (5) Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Mei 2010. (6) Ekonomi Kelautan dan Pesisir, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, April 2011. (7) Statistika Ekonomi, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe, November 2012. (8) Reformulasi Mikro dan Makro Ekonomi Syariah sebagai Sistem Ekonomi Alternatif, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe, Desember 2012. Tahun 2014, disertasinya diterbitkan oleh

Graha Ilmu Yogyakarta dengan judul Dayah Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia.

Pada tahun 1995 penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dan pada tahun 2001 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tahun 1999-2002 di percayakan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Unimal. Tahun 2002-2006 terpilih sebagai Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta pada tahun 2006-2010 di percayakan memegang jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh. Tahun 2010 terpilih sebagai Rektor Universitas Malikussaleh. Tahun 2014 terpilih untuk periode kedua sebagai Rektor Universitas Malikussaleh.

KOMENTAR DI SAMPUL BELAKANG

Majunya suatu bangsa dikarenakan peradaban yang sarat dengan etika moral

Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Prof. Apridar membiktikan diri sebagai akademisi yang tidak “tenggelam” dalam rutinitas dan birokrasi di perguruan tinggi yang begitu tinggi. Beliau dapat terus menulis dan meneliti serta mengkaji berbagai bidang dan dapat beliau buktikan dalam buku ini. Buku ilmiah populer, disajikan dengan ringan namun penuh makna dan solusi. Wajib dimiliki sebagai referensi.

PROF. Dr. Ir. SYAMSUL RIZAL, M.Eng

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Buku ini bertenaga. Penulis buku ini, mampu memadukan imajinasi konstruktif dengan pengetahuannya. Layaknya sebuah Esai, membaca buku ini memahami persoalan Aceh dengan singkat, tapi sarat dengan makna. Ini menjadi dokumentasi penting bagi tradisi keilmuan Aceh. Prof Apridar telah membuktikan dokumentasinya.

M. ADLI ABDULLAH

Anggota Permanen International Collective Support of Fishworkers

Tidak banyak akademisi yang sedang menduduki jabatan puncak, punya waktu luang untuk menulis, terutama artikel-artikel untuk konsumsi publik di media massa. Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si, Rektor Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, adalah satu di antara akademisi yang tergolong paling produktif menulis di media-media lokal maupun nasional. Buku *Ekonomi Peradaban; Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Keagamaan*, yang sedang kita pegang ini adalah satu kumpulan tulisan pengalaman keilmuan beliau dalam kapasitasnya sebagai seorang akademisi dan Rektor Unimal, yang pernah dipublikasi oleh berbagai berbagai media. Karenanya, buku ini menjadi satu referensi penting dalam memperkaya khazanah kepustakaan kita.

ASNAWI KUMAR

HARIAN SERAMBI INDONESIA.

EKONOMI PASCA PERANG

Setelah 11 tahun penandatanganan Kesepakatan Damai Helsinki, Aceh kini relatif lebih aman dan stabil. Konflik antara pasukan TNI/Polri dengan kelompok pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak terjadi lagi. Perjuangan militer yang dilakukan GAM tempo dulu, kini beralih menjadi perjuangan politik dan ekonomi. Mereka masuk menjadi pemimpin sejumlah kabupaten/kota di Aceh termasuk menjadi gubernur Aceh. Pergumulan program kerja yang bermuara pada meningkatkannya taraf ekonomi masyarakat menjadi debat panjang antar birokrasi pemerintah. Di sisi lain, sentuhan menuntaskan kemiskinan, peluang lapangan kerja dan mengurai pengangguran menjadi keniscayaan bagi daerah bekas perang.

Dana besar yang bersumber dari otonomi khusus belum menjamin peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itulah buku ini ditulis. Menawarkan beberapa konsep pembangunan dari berbagai sektor seperti pertanian, kawasan ekonomi khusus, dan potensi kelautan. Sebagai daerah bekas perang, membahas perekonomian di Aceh tentu sangat menarik. Buku ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pemerintah membangun daerah pasca perang dan tsunami.



Prof. Dr. H. Apridar, S.E., M.Si., lahir pada 13 April 1967 di Lhokseumawe, Aceh. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh (1993), gelar magister dari program pasca sarjana Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Universitas Syah Kuala dan gelar doktoral juga dari universitas yang sama dengan disertasi “Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia”. Sepanjang karirnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh (Unimal), ia telah menulis 11

buku referensi tentang ekonomi. Ia pernah menjabat Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Unimal, Dekan Fakultas Ekonomi Unimal, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unimal, dan sejak 2010 sampai sekarang menjabat Rektor Unimal. Sejumlah buku yang ditulisnya diantaranya buku *Ekonomi Internasional* (2008), *Teori Ekonomi* (2010), *Ekonomi Kelautan* (2011), *Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia* (2014) dan buku terbarunya *Ekonomi Peradaban* (2015).


expert



ISBN: 978-602-18166-3-9

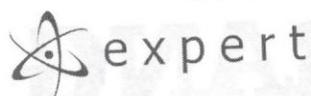


9 786021 816639

EKONOMI PASCA PERANG

oleh Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.

Hak Cipta © 2016 pada penulis



Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Apridar

EKONOMI PASCA PERANG/Apridar

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: expert, 2016
x + 124 hlm.; 25 cm

Bibliografi.: 109 - 112

ISBN : 978-602-18166-3-9

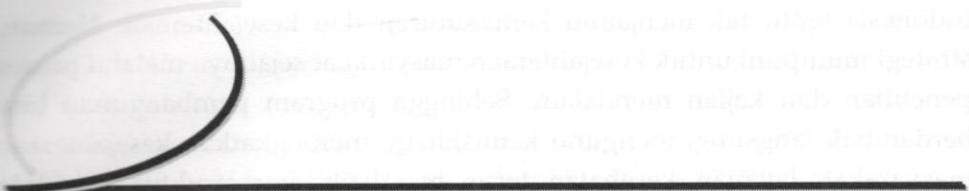
E-ISBN : 978-602-18166-4-6

1. Ekonomi - Situasi dan Kondisi Ekonomi

I. Judul

330.91

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji sukur ke hadirat Allah SWT serta atas segala rahmat dan petunjuk Allah SWT, saya bisa menyelesaikan penulisan buku yang berada di tangan Anda ini.

Sebagian dari tulisan ini pernah saya gunakan untuk kerja karya perorangan saat mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

Ide awal menulis buku ini untuk kemajuan ekonomi daerah khusus, spesifik Aceh. Di mana, publik tahu secara umum Aceh dikenal karena dua hal, perang dan tsunami. Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia berakhir pada 2015 silam.

Konsekuensi logis daerah perang adalah keteringgalan, keterbelakangan dan keterpurukan di semua lini kehidupan. Tak ada harapan, tak ada pula kemajuan signifikan. Sementara daerah lainnya di negeri ini terus berkembang, menjadi *smart city* dan seterusnya.

Konsep yang ditawarkan buku ini untuk kemajuan daerah khusus seperti Aceh, Papua, menjadi salah satu daerah khusus lainnya di nusantara. Mungkin, konsep ini juga bisa bermanfaat untuk kabupaten/kota lainnya di tanah air.

Membangun daerah bekas perang dan tsunami tentu butuh strategi. Memiliki fondasi dana besar lewat alokasi khusus dari Pemerintah

Indonesia tentu tak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Namun, strategi mumpuni untuk kesejahteraan masyarakat sejatinya melalui proses penelitian dan kajian mendalam. Sehingga program pembangunan bisa berdampak langsung, mengurai kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan terus membaik, infrastruktur dan lain sebagainya.

Sejatinya, salah satu penyebab konflik adalah ketidakadilan dan kemiskinan di suatu daerah tertentu. Jangan sampai, kondisi itu terjadi sehingga kestabilan keamanan dan politik tidak terwujud.

Saya mengucapkan terima kasih pada orang tua saya, almarhum Abdurrahman dan almarhumah Dawiyah. Keduanya menjadi tokoh yang hangat, teman diskusi panjang dalam berbagai hal.

Pada istri saya, dan putra putri saya. Mereka merelakan waktu bermainnya, tersita selama proses kegiatan penulisan buku ini. Khusus untuk istri saya, terima kasih selalu membantu mencari aneka bahan untuk kajian buku ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Jana Anggadireja yang telah memberikan masukan konstruktif untuk penulisan buku ini. Pada Masriadi Sambo, anak muda yang menjadi pendebat tangguh soal sosial dan politik. Buat Damanhur dan Mohd Heikal, keduanya menemani saya sejak lama.

Pada penerbit yang selalu bersedia menerbitkan karya saya. Sungguh hubungan yang baik ini selalu saya ingat. Dan, terakhir pada kolega saya di Universitas Malikussaleh, dari mahasiswa hingga dosen, dari staf hingga satuan pengamanan. Saya senang karena kalian bekerja keras untuk kemajuan kampus kita. Pada para pembaca, mohon maaf bila karya ini dianggap tidak sempurna, sesungguhnya kesempurnaan hanya dari Allah SWT, dan kekurangan dari saya pribadi. Kami menerima kritik untuk perbaikan buku ini ke depan, dan tabik.

Lhokseumawe-Jakarta, 1 Januari 2017

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.